TATA KELOLA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI DESA WONOASRI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Desika Intan Firliani
NIM : 221102030032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TATA KELOLA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI DESA WONOASRI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Desika Intan Firliani
NIM: 221102030032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TATA KELOLA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI DESA WONOASRI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

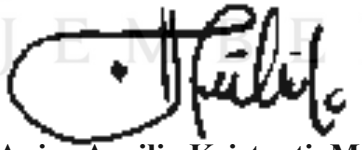
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Desika Intan Firliani
NIM: 221102030032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP.19920429201903202

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TATA KELOLA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI DESA WONOASRI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua

Fathor Rahman, M.Sy.

NIP. 198406052018011001

Sekretaris

Dwi Hastuti, M.P.A

NIP. 198705082019032008

Anggota :

1. Dr. H. Khoirul Faizin, M.Ag. ( )
2. Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd. ( )

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, S.H.I. M.A.

NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

"Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata." (QS. Al-baqarah [2]: 168).[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), 168.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan kemudahan yang telah diberikan, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Dengan hormat dan kerendahan hati, kepada kedua orang tua tercinta saya ucapkan terimakasih yang teramat dalam kepada Bapak Suroso yang selalu berjuang melawan kerasnya ombak demi mewujudkan impian beliau agar putrinya bisa berpendidikan tinggi. Tak kala berjasa, Ibu Khomsatun sosok hebat yang selalu siap sedia mendengarkan semua cerita serta senantiasa memberikan motivasi yang optimis dan cinta yang tulus kepada putri tercintanya.

2. Selanjutnya, kepada adik tersayang saya Marcello yang telah memberikan semangat kepada penulis. Meskipun terkadang menyebalkan tetapi terima kasih sudah memberikan dukungan melalui caranya sendiri yang menjadikan alasan penulis bisa terus berkembang dan melangkah lebih jauh. Semoga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk masa depan yang lebih baik.

3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, Pipik'ah dan Mbak Fida yang selalu hadir memberikan bantuan, semangat, dan kebersamaan selama masa perkuliahan mulai semester 1 hingga saat ini dalam suka maupun duka. Selanjutnya, kepada sahabat masa kecil saya Kakak Dita, Mbak Tiya, Fika Amelia yang selalu menemani penulis dalam kesusahan maupun kebahagiaan. Nongkrong bersama, main bersama, gibah bersama, terima

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kasih telah menemani penulis selama 20 tahun yang tidak mudah. Semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu.

4. Dan terakhir, untuk diri penulis sendiri, terima kasih karena telah mampu bertahan, berjuang, dan menyelesaikan proses ini hingga akhir. Terima kasih atas segala usaha, air mata, rasa lelah, kecewa, serta tekanan yang berhasil dilewati selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah meskipun banyak hal terasa berat dan melelahkan. Terima kasih karena tetap bangkit setiap kali merasa gagal, tetap mencoba ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan, serta tetap percaya bahwa semua proses ini akan memberikan pelajaran berharga. Perjalanan ini bukan hanya tentang menyelesaikan skripsi, tetapi juga tentang belajar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dewasa dalam menghadapi tantangan kehidupan. Semoga segala perjuangan, pengorbanan, dan doa yang telah diusahakan selama ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik, serta menjadi pengingat bahwa diri ini mampu melewati hal-hal sulit dengan penuh keteguhan dan kesabaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan segala puji syukur kepada Allah SWT, sholawat serta salam senantiasa dilantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas nikmat, Rahmat dan Hidayah-Nya, dilancarkannya proses dalam mencari ilmu, serta penyelesaian skripsi ini dengan judul "Tata Kelola Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Desa Wonoasri Kabupaten Jember" dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat waktu.

Selanjutnya sebagai makhluk yang diciptakan dengan kekurangan dan keterbatasan oleh Allah SWT, maka begitu pula dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat banyak kesalahan-kesalahan karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang ada dalam diri penulis. terhormat : Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan sedalam-dalamnya kepada yang

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas akademik yang baik di Fakultas Syariah.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Plt Kepala Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ruang kepada saya untuk mengasah pengetahuan di Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Sariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu sabar untuk memberikan arahan dan motivasinya selama proses perkuliahan penulis
5. Ibu Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan bimbingan keintelektualannya dan selalu memberikan motivasi agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Basuki Kurniawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusunan skripsi ini, yang telah sabar memberikan bimbingan serta arahan penulis ketika penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya secara ikhlas dan setulus hati. Beserta eluruh staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan mendoakan, serta dukungan yang telah tersampaikan semoga memperoleh limpahan pahala dari Allah SWT.

Jember, Juli 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Desika Intan Firliani, 2026: *Tata Kelola Pelaksanaan Dan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Desa Wonoasri Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis, Implementasi Penyaluran, Pengawasan, SPPG, Badan Gizi Nasional

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk memenuhi hak konstitusional atas pangan dan gizi sebagaimana diamanatkan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, ditemukan sejumlah persoalan di lapangan, antara lain buah dalam kondisi busuk, lauk basi, keterlambatan distribusi hingga pukul 14.00 WIB, menu yang lebih sederhana dari standar gizi yang disosialisasikan, serta beban penerima manfaat yang melampaui ketentuan SPPG pedesaan (1.300 penerima, padahal batas ketentuan di bawah 1.000). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaan program.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi penyaluran dan bagaimana bentuk pengawasan Program MBG di SPPG Desa Wonoasri. Tujuan penelitian adalah menganalisis kedua aspek tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, SOP Kementerian Kesehatan, dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG.

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam kepada petugas persiapan, petugas pemorsian, dan pihak sekolah penerima manfaat, serta melalui studi dokumen. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyaluran Program MBG telah berjalan terstruktur, mulai dari persiapan bahan, pengolahan, pemorsian, hingga distribusi, didukung administrasi surat jalan dan Berita Acara Serah Terima (BAST), serta bersifat adaptif terhadap kondisi lapangan seperti penyesuaian menu saat Ramadan. Namun, masih ditemukan kendala berupa buah busuk, lauk basi, kekurangan nasi, keterlambatan distribusi, dan keterbatasan tenaga kerja. Pengawasan dilakukan secara internal oleh Kepala Dapur, Ahli Gizi, Akuntan, dan Asisten Lapangan, serta secara eksternal oleh Puskesmas, BPOM, dan CCTV yang terhubung dengan Badan Gizi Nasional, disertai uji organoleptik pada menu baru sebelum didistribusikan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

Hal

JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
ABSTRAK ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 13
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 13
1. Manfaat Teoretis 13
2. Manfaat Praktis 14
E. Definisi Istilah 14
1. Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis 15
2. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 15
F. Sistematika Pembahasan 15
BAB II KAJIAN PUSTAKA **18**
A. Penelitian Terdahulu 18
B. Kajian Teori 30
a. Teori Implementasi Kebijakan Publik 30
b. Teori Hukum Sosiological Jurisprudence 32
c. Teori Birokrasi Max Weber 34
d. Teori Pengawasan George R. Terry 38
BAB III METODE PENELITIAN **41**
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 41

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Lokasi Penelitian 42
C. Subyek Penelitian 43
D. Teknik Pengumpulan Data 44
E. Analisis Data 46
F. Keabsahan Data 47
G. Tahap-tahap Penelitian 49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 50
A. Gambaran Objek Penelitian 50
B. Penyajian dan Analisis Data 59
a. Implementasi Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Desa Wonoasri Kabupaten Jember 59
b. Bentuk Pengawasan Terhadap Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Desa Wonoasri Kabupaten Jember 79
C. Pembahasan Temuan 89
a. Implementasi Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Desa Wonoasri Kabupaten Jember 89
b. Bentuk Pengawasan Terhadap Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Desa Wonoasri Kabupaten Jember 101
BAB V PENUTUP 117
A. Simpulan 117
B. Saran-saran 118
DAFTAR PUSTAKA 120

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Hal

2.1 Daftar Penelitian Terdahulu 23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Hal

4.1 Struktur Pengorganisasian Pekerja SPPG 51

4.2 Surat Jalan Dan Berita Acara Serah Terima Dari SPPG Desa Wonoasri 72

4.3 Gambaran Menu Perbedaan Porsi Kecil Dan Porsi Besar Di SPPG Desa Wonoasri 75

4.4 Ceklist Uji Organoleptik DariSPPG Desa Wonoasri 87

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Hal

Lampiran 1 Matriks Penelitian.....125

Lampiran 2 Dokumentasi Bersama Narasumber 128

Lampiran 3 Bukti Akun Resmi Narasumber Staf Sppg Desa Wonoasri

.....130

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam situasi pemilihan pemimpin di Indonesia, janji para pemimpin menjadi sebuah hal penting dalam meraih dukungan pemilih. Terutama pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, dalam konteks ini yang menjadi sorotan publik adalah janji dari pasangan calon terpilih Prabowo – Gibran untuk menyediakan makan siang bergizi gratis bagi masyarakat Indonesia. Janji yang dibawa bukan hanya rencana semata akan tetapi janji dari program ini dengan slogan mereka yang disebut "Bersama Indonesia Maju Bersama Indonesia Emas 2045".[2]

Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 (UUD NRI 1945) adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu hak konstitusional yang seharusnya dijamin oleh negara adalah hak atas hidup layak, termasuk hak atas pangan dan gizi yang memadai, sebagaimana tertuang dalam pasal 28B ayat (2) dan pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945.[3] Dalam aturan tersebut menjelaskan program makan bergizi gratis bagi masyarakat khususnya anak–anak dan pelajar,

[2] Rahmawati, N. A., Prasetyo, S. A., & Ramadhani, M. W, "Memetakan Visi Prabowo Gibran Pada Masa Kampanye Dalam Prespektif Pembangunan", Deleted Journal., (2024), Https://Doi.Org/10.62383/Wissen.V2i3.176

[3] Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Dan Pasal 28C.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak–hak dasar warga negaranya.[4] Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah telah meluncurkan program yang bertujuan untuk memenuhi gizi pada anak Indonesia yaitu Makan Bergizi Gratis atau yang biasa disebut MBG.[5]

Makan gratis merupakan penyediaan makanan tanpa harus membayarnya, tentu makan gratis menjadi dambaan banyak orang sebab makan adalah kebutuhan sehari–hari, maka jika ada kata "gratis" tentu akan sangat membahagiakan karena seseorang bisa makan tanpa harus membayarnya.[6] Adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini dipercaya sebagai aktor pelaksana untuk mendistribusikan program makan bergizi gratis kepada penerima manfaat yang diharapkan semua penerima manfaat menerima MBG untuk memenuhi gizi seimbang bagi anak Indonesia agar mereka bisa fokus pada pendidikan karena dalam dunia pendidikan gizi seimbang sangat diperlukan.

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada kurikulum dan metode pembelajaran. Tetapi juga pada faktor eksternal yang memengaruhi perkembangan pada fisik dan otak siswa. Salah satu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Andin, A., et al., Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis. *Indonesian Journal of Education and Development Research*., (2024), https://doi.org/10.57235/ijedr.v3i1.4684

[5]Uun Mua'bidah., "implementasi kewenangan pemerintah kabupaten jember dalam pelaksanaan *online single submission* pada perizinan usaha." (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 11-12.

[6] Nainggolan, I. D. P., & Claretta, D, "Analisis Framing Portal Berita Kompas.Com dan Mediaindonesia.Com atas Pemberitaan Program Makan Siang Gratis oleh Paslon 02 (Prabowo-Gibran) Pada Periode 28 November 2023 - 10 Februari 2024", *Religion, Education, and Social Laa Roiba Journal (RESLAJ)*., (2023 – 2024) https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i10.3038

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan pendidikan adalah kecukupan gizi anak sekolah, yang berperan dalam meningkatkan daya pikir, stamina dan ketahanan belajar mereka. Asupan gizi yang memadai memungkinkan siswa untuk lebih fokus dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat menyerap materi yang lebih efektif. Selain itu, gizi yang baik juga berdampak pada perkembangan fisik yang optimal, yang pada gilirannya mendukung aktivitas motorik serta interaksi sosial di lingkungan sekolah.[7] Akan tetapi, di Indonesia masih banyak sekali anak yang kekurangan gizi seimbang sehingga ini membuat daya pikir anak lambat serta kurang fokusnya terhadap pembelajaran. Indonesia masih mengalami tantangan pada pemenuhan gizi yang diharapkan kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini mampu untuk memenuhi gizi anak Indonesia.

Berbagai penelitian telah menunjukan bahwa anak–anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup memiliki tingkat konsentrasi yang lebih tinggi, prestasi akademik yang lebih baik, serta tingkat kehadiran yang lebih stabil di sekolah, sebaliknya kurangnya asupan gizi dapat menyebabkan masalah jangka panjang seperti keterlambatan perkembangan mental dan rendahnya kapasitas berpikir kritis.[8]

[7] Susilowati, E., et al., "Analisis kebutuhan dan pemenuhan nutrisi pada anak usia dini di indonesia: tantangan, dampak, dan strategi intervensi dalam pendidikan", *Jurnal Madinasika*., (2025) https://doi.org/10.31949/madinasika.v6i2.14084

[8] Prangthip, P., Soe, Y. M., & Signar, J. F, "Literature review: nutritional factors influencing academic achievement in school age children", *International Journal of Adolescent Medicine and Health*., (2021), https://doi.org/10.1515/IJAMH-2018-0142

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pemenuhan gizi yang seimbang sejak usia dini merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian besar terhadap masalah gizi, terutama pada anak usia sekolah karena masa tersebut merupakan fase pertumbuhan yang membutuhkan asupan nutrisi optimal. Kekurangan gizi pada anak dapat berdampak pada penurunan konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, serta tumbuh kembang secara keseluruhan.[9]

Program makan bergizi gratis ini tidak hanya menjadi intervensi dalam bidang kesehatan. Namun juga merupakan bagian dari strategi pembangunan sosial dan pendidikan. Sebagai respon kondisi ini pemerintah Kabupaten Jember mulai menerapkan program makan bergizi gratis. Program ini bertujuan bukan hanya memperbaiki status gizi anak, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar, menurunkan angka absensi, serta membentuk kebiasaan makan sehat di lingkungan sekolah.[10] Untuk itu SPPG di Kabupaten Jember mulai banyak yang aktif dan mulai banyak sekolah–sekolah yang menerima makan bergizi gratis dari pemerintah setiap harinya. Terutama di SPPG Desa Wonoasri yang sudah aktif dan sudah banyak mendistribusikan makan bergizi gratis kepada penerima manfaat.

[9] S, M. I., Desreza, N., & Resta., "Edukasi Pentingnya Makanan Bergizi Dan Memilih Jajanan Sehat Bagi Anak Usia Sekolah", *Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat*., (2023), https://doi.org/10.47861/jipm-nalanda.v1i3.448

[10] Agustini, U. "Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Kiprah Pendidikan*, (2025), https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik. Pelaksanaan program ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang menegaskan bahwa makanan yang disalurkan harus memenuhi prinsip keamanan pangan, ketetapan waktu pendistribusian, serta kecukupan dan keseimbangan gizi.[11] Selain itu, pelaksanaan teknis MBG juga didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Kementerian Kesehatan yang menegaskan tentang Sosialisasi SOP Keamanan Pangan Siap Saji Pada Program Makan Bergizi Gratis yang mengatur aspek higiene sanitasi, pengendalian mutu pangan, dan mekanisme pengawasan,[12] serta Petunjuk Teknis (JUKNIS) tentang Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis yang didalamnya sebagai pedoman bagi Badan Gizi Nasional mulai dari pengelolaan sampai dengan pengawasan pada program makan bergizi gratis.[13]

Namun, dalam praktik pelaksanaan program MBG di SPPG Desa Wonoasri, masih ditemukan beberapa permasalahan yang berpotensi

[11] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

[12] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Sosialisasi SOP Keamanan Pangan Siap Saji Pada Program Makan Bergizi Gratis, (2025).

[13] Badan Gizi Nasional, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gatis, (2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan aturan dan kondisi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah penerima manfaat, pernah ditemukan buah dalam kondisi busuk yang cukup sering terjadi karena tidak dilakukan penyortiran ulang sebelum pendistribusian. Dan juga pernah ditemukannya lauk basi yaitu ayam.[14] Meskipun kejadian ayam basi ini hanya terjadi satu kali pada awal masa pendistribusian. Kondisi ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan "pengawasan terhadap keamanan pangan dan mutu pangan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan" dari masalah buah busuk tersebut menunjukkan bahwa pengawasan keamanan pangan tidak dilaksanakan berkelanjutan atau tidak dilakukan penyortiran ulang,[15] lalu pada pasal 24 ayat (4) menyebutkan "prioritas pengawasan berbasis resiko mencakup pengawasan bahan baku berupa pangan segar"[16] dari kejadian lauk ayam yang basi itu menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan terhadap pangan segar asal hewan sehingga menyebabkan basi atau bau. Hal ini juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis penyelenggaraan program makan bergizi gratis yang menyebutkan "bahwa SPPG harus bertanggung jawab pada *Quality Control* terhadap bahan baku dari buah (sortir dan timbang) ketika buah datang dan melakukan pengecekan terhadap bahan baku lauk (ayam, ikan, daging, telur) yang dikirim oleh pemasok untuk menjaga kualitas

[14] Farhan Saputra, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Januari 2026.
[15] Setneg RI, PERPRES No. 115 tahun 2025, pasal 24 (1).
[16] Setneg RI, PERPRES No. 115 tahun 2025, pasal 24 ayat (4).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

makanan"[17] dalam hal ini jelas menunjukkan lemahnya pengawasan menyebabkan rusaknya kualitas makanan dan bahan baku pangan.

Selain itu, permasalahan juga terjadi pada aspek ketepatan waktu pendistribusian.[18] Pendistribusian yang seharusnya dilakukan pada pukul 10.00 WIB sesuai dengan Petunjuk Teknis yang menyebutkan "jam 10.00 pengantaran untuk SD kelas 4 sampai 6, SMP, SMA, ibu hamil dan menyusui".[19] Pernah mengalami keterlambatan hingga pukul 14.00 WIB. Keterlambatan tersebut menimbulkan komplain dari pihak sekolah yaitu adrasah Tsanawiyah Nurussalam Desa Wonoasri karena siswa berada dalam sistem *full day school* yang kebetulan MTs Nurussalam ini sangat bergantung pada pemberian makanan program MBG. Meskipun pada akhirnya makanan tetap diberikan kepada siswa walaupun sudah lewat jam makan siang, kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme distribusi belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip pelayanan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis.

Permasalahan juga muncul pada aspek kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam SOP Kementerian Kesehatan ditegaskan "pangan yang diterima harus langsung dikonsumsi oleh siswa sesuai jadwal makan di sekolah yang sudah ditetapkan (tidak boleh dibawa

[17] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG, hlm. 37.
[18] Farhan Saputra, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Januari 2026.
[19] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 40.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pulang".[20] Namun dalam praktinya banyak siswa membawa kotak bekal kosong untuk membawa pulang MBG atas arahan guru. Karena banyak siswa yang tidak suka dan tidak habis sehingga mubazir jika dibuang maka siswa diberi arahan agar dibawa pulang saja.[21] Namun pada kenyataannya iktikad baik guru itu salah, jika makanan dibawa pulang risiko kontaminasi setelah keluar dari kontrol SPPG tentu ini bisa menyebabkan kejadian luar biasa seperti keracunan karena jika dimakan disekolah itu masih menjadi tanggung jawab penyelenggara dan apabila dibawa pulang rantai tanggung jawab menjadi kabur sehingga mau komplain pun itu tidak bisa karena makanan siap saji ini harus segera dikonsumsi dalam rentang waktu aman. Praktik ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan SOP belum berjalan efektif, baik dari pihak sekolah maupun dari SPPG sebagai pelaksana teknis program.

Terdapat juga menu yang relatif sederhana, seperti nasi dengan tahu. kentang dengan bumbu kacang serta buah semangka. Pihak sekolah mengakui bahwa menu yang diterima tidak sepenuhnya sesuai dengan menu yang disampaikan saat sosialisasi awal. Namun demikian, pihak sekolah tetap menerima menu tersebut karena tidak memiliki kapasitas untuk menilai kecukupan gizi secara teknis dan lebih menitikberatkan

[20] Kemenkes RI, Sosialisasi SOP Keamanan Pangan Siap Saji Pada Program MBG, (2025).

[21] Winarsih, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 November 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada aspek terpenuhinya kebutuhan makan siswa.[22] Sosialisasi awal pada saat itu pihak kesiswaan di undang untuk mendengarkan edukasi dari SPPG tentang informasi mengenai gizi dan keamanan pangan, ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan "SPPG mempunyai tugas melaksanakan sebagian atau seluruh tugas layanan penyediaan dan distribusi makanan bergizi secara gratis serta memberikan edukasi atau informasi gizi dan keamanan pangan kepada kelompok sasaran".[23] Namun kenyataannya menu yang diterima pihak sekolah tidak sesuai dengan gizi yang di informasikan oleh pihak SPPG terlihat dari nasi dan kentang yang 2 jenis ini termasuk karbohidrat. Hal ini menunjukkan adanya ketidak sesuaian standar gizi pada penerima manfaat. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis yang menyebutkan "SPPG bertanggung jawab dan memastikan tempat makan terisi semua (nasi, lauk , sayur, buah, dan susu)".[24] Akan tetapi dari menu yang sangat sederhana itu menunjukkan bahwa pengawasan dalam pemorsian ini lemah dan tidak sesuai aturan sehingga standar gizi tidak terpenuhi.

Berbagai temuan empiris tersebut menunjukkan persoalan utama Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Jember bukan terletak pada

[22] Farhan Saputra, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Januari 2025.
[23] Setneg RI, PERPRES No. 115 Tahun 2025, pasal 16 ayat (1).
[24] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 37.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perumusan kebijakan, melainkan pada tahap pelaksanaan dan pengawasan.[25] Inilah yang menjadi alasan ilmiah mengapa penelitian ini memfokuskan kajian pada Tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, khususnya pada implementasi penyaluran dan bentuk pengawasan di SPPG.

Penelitian fokus dilaksanakan di SPPG Desa Wonoasri karena selain melihat dari banyaknya permasalahan yang tidak sesuai aturan juga kita bisa melihat bagaimana pelaksanaan program ini di pedesaan. SPPG Desa Wonoasri ini juga mendistribusikan makanan bergizi gratis diluar daerah pedesaan yang mana seharusnya SPPG terpencil atau pedesaan yang tidak masuk aglomerasi (padat penduduk) hanya melayani di bawah 1000 penerima manfaat tetapi karena mencakup desa sebelah dengan 2 sekolah maka SPPG Desa Wonoasri harus melayani 1.300 penerima manfaat. Ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan "SPPG terpencil yang melayani penerima manfaat di bawah 1000 (seribu) orang".[26] Dan tentu ini tidak sesuai dengan aturan sehingga menyebabkan sekolah yang ada di Wonoasri sendiri tidak mendapat MBG pada hari itu karena kehabisan setelah dilakukan pendistribusian di desa sebelah. Praktik ini juga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintan

[25] Azzahra, N., Dharmawan, A., Mardatilah, A., Habibi, M., Aryani, V., & , S, "Pelaksanaan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 4 Tangerang", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan., (2025)., https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1335

[26] Setneg RI, PERPRES No. 115 Tahun 2025, pasal 16 ayat (2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk Program Makan Bergizi Gratis yang menyebutkan "SPPG bertanggung jawab memastikan setiap sekolah penerima manfaat mendapatkan porsi makanan sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan ditunjang dengan bukti yang konkret dan standar operasional yang sudah ditentukan"[27] dari kurangnya jumlah makanan yang dibuat oleh SPPG ini membuat pihak sekolah tidak menerima makanan sama sekali bukan kurang tapi tidak dapat karena dari pihak SPPG mengkonfir bahwa makanannya habis dan harus biat lagi sehingga terjadi keterlambatan pendistribusian kepada pihak penerima manfaat sampai jam 14.00 melewatkan waktu makan siang siswa.

Penelitian ini merupakan kajian awal yang menguji implementasi Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, Petunjuk Teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah, serta SOP Kemeneterian Kesehatan terkait keamanan pangan siap saji. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai kesusaian antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan sebelum berlakunya berlakunya regulasi tersebut dan lebih berfokus pada kajian teoritis dan perspektif hukum islam, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada tahap implementasi penyaluran dan pengawasan. Fokus ini dipilih karena kedua tahapan tersebut merupakan

[27] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 38.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bagian yang secara langsung mencerminkan pelaksanaan program di lapangan serta menentukan efektivitas tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Selain itu, permasalahan program lebih banyak ditemukan pada proses implementasi penyaluran dan pengawasan. Fokus implementasi penyaluran dan pengawasan tersebut didasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mengatur tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di Daerah sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk pembagian peran antar lembaga. Dalam peraturan tersebut, implementasi penyaluran dan pengawasan menjadi bagian penting yang langsung dilaksanakan di tingkat SPPG dan Daerah.

Dalam pelaksanaan program ini juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Kesehatan tentang Sosialisasi SOP Keamanan Pangan Siap Saji Pada Program Makan Bergizi Gratis yang secara teknis mengatur pengawasan mutu, keamanan pangan, dan sasaran penerima. Dan dalam implementasinya program ini juga menggunakan Petunjuk Teknis yang secara bertujuan membantu penyelenggaraan program makan bergizi gratis disemua SPPG terutama SPPG Desa Wonoasri ini. Sementara itu, pada tahapan perencanaan dan evaluasi umumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga tidak banyak perbedaan dalam penerapannya disetiap Daerah. Oleh karena itu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

agar penelitian lebih terarah dan mendalam, penelitian ini hanya berfokus pada impelementasi penyaluran dan pengawasan untuk melihat bagaimana implementasi serta pengawasan program di SPPG pedesaan Kabupaten Jember.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi penyaluran Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Desa Wonoasri Kabupaten Jember?
2. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap penyaluran Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Desa Wonoasri Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi penyaluran Program Makan Bergizi Gratis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Wonoasri Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis bentuk pengawasan terhadap penyaluran Program Makan Bergizi Gratis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Wonoasri Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi politik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan dan pengawasan pelayanan publik, dengan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperkaya pemahaman mengenai kesenjangan antara aturan dan praktik dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis agar sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 115 Tahun 2025.

b. Bagi SPPG Desa Wonoasri

Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pelaksanaan dan pengawasan, sehingga kualitas penyaluran makanan bergizi dapat lebih terjamin.

c. Bagi Sekolah dan Penerima Manfaat

Penelitian ini diharapkan mendorong peningkatan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis serta perlindungan hak penerima manfaat untuk memperoleh makanan yang aman, layak dan bergizi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penejelasan tentang konteks yang di gunakan dalam penelitian ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil dari penelitian ini. Definisi istilah dalam penelitian ini disusun untuk memberikan penjelasan terhadap istilah – istilah sekaligus

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mempertegas fokus dan batasan penelitian, sehingga pembaca memahami secara tepat ruang lingkup kajian yang dilakukan. Berikut beberapa istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini:

1. Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

   Program Makan Bergizi Gratis adalah program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis yang tepat sasaran dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi kepada kelompok sasaran. Percepatan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis adalah setiap upaya yang mencakup tata kelola pemberian makanan bergizi secara gratis dan penguatan ekosistem pendukung melalui kerja sama multi sektor di pusat, daerah, dan desa.[28]

2. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

   Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selanjutnya disingkat SPPG adalah unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPPG.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini disusun untuk membuat pembaca memahami penelitian secara bertahap, bagaimana peneliti menjelaskan

[28] Setneg RI, PERPRES No. 115 Tahun 2025, pasal 1 ayat (1) dan (2).
[29] Setneg RI, PERPRES No. 115 Tahun 2025, pasal 1 ayat (19).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembahasan yang ada didalamya. Sistematika ini dibagi menjadi 5 BAB yaitu:

BAB I: pada BAB I ini peneliti menjelaskan tentang Pendahuluan yang menggambarkan penelitian yang akan dilakukan. Pendahuluan ini sebagai pengantar untuk memahami latar belakang serta masalah agar jelas arah penelitian ini. Pada BAB I ini berisi Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Sistematika Pembahasan pada di BAB I ini.

BAB II: BAB II ini berisi kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu serta landasan teori, yaitu Teori Implementasi Kebijakan Publik oleh Edward III, Teori Birokrasi oleh Max Weber, Teori *Sociological Jurisprudence* oleh Roscoe Pound, dan Teori Pengawasan oleh George R. Terry.

BAB III: Pada BAB III ini berisi Metode Penelitian yang menjelaskan cara dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. BAB II ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proses penelitian secara sistematis dan menjamin keabsahan hasil penelitian. Pada BAB III ini berisi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data dan Keabsahan Data.

BAB IV: Pada BAB IV ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan yang berfokus pada implementasi program makan bergizi gratis di Kabupaten Jember dengan studi di SPPG Desa Wonoasri yang dimana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori–teori yang telah dijelaskan pada BAB II.

BAB V: Pada BAB V peneliti menyajikan simpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

a. Artikel jurnal yang ditulis oleh Sarah Meirina Sari dengan judul *"Implementation Of The Free Nutritious Meal Policy In Bondowoso Regency"*.[30]

Persamaan: penelitian ini sama – sama mengkaji kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk melihat bagaimana pelaksanaan MBG ini di lapangan dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode untuk melakukan wawancara, observasi, dan dokumen sebagai perbandingan. Penelitian ini juga mencakup penetapan sasaran, pengaturan pendistribusian makanan, serta identifikasi kebutuhan peserta didik. Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward yang mencakup tiga dimensi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perbedaan: Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada aturan yang digunakan. Pada penelitian

[30] Sari, S. M." Implementation of the free nutritious meal policy in bondowoso regency." *Journal Publicuho*., (2025): https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.896

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terdahulu menggunakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 sedangkan penelitian penulis menggunakan aturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Meskipun penulis juga menggunakan teori implementasi kebijakan Edward tetapi tidak mencakup semua dimensi, penulis hanya berfokus pada dua dimensi yaitu pelaksanaan dan pengawasan.

b. Artikel jurnal hukum dan administrasi publik yang ditulis oleh Angga Rosidin, Jaka Maulana, dan Awan Dharmawan dengan judul *"Tantangan dan Strategi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Banten"*.[31]

Persamaan: penelitian ini sama – sama membahas implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat. Fokus kajian diarahkan pada proses pelaksanaan program serta berbagai tantangan yang muncul dalam implementasinya, sehingga baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini berupaya memeberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan tersebut di lapangan.

Perbedaan: perbedaan utama antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tingkat analisis dan cakupan wilayah penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada tantangan dan strategi implementasi Program Makan Bergizi Gratis di tingkat Pemerintah Provinsi Banten dengan cakupan wilayah yang lebih

[31] Angga Rosidin, Jaka Maulana, Awan Dharmawan. " Tantangan dan Strategi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Banten". *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik* ., (2025):131–143.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

luas. Sementara itu penelitian ini memfokuskan kajian empiris pada tingkat unit pelaksana, yaitu SPPG Desa Wonoasri di Kabupaten Jember, dengan menekankan pada dinamika pelaksana di lapangan. Fokus tersebut memungkinkan penelitian ini memberikan gambaran yang lebih konkret dan mendalam mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis.

c. Artikel jurnal yang ditulis oleh Andri Kusuma Jati, Azhar, dan Atrika Iriani dengan judul *"Formulasi kebijakan pemerintah tentang program makan bergizi gratis di indonesia"*.[32]

Persamaan: penelitian dalam artikel ini sama – sama mengkaji Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini menempatkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan strategis yang memiliki urgensi penting dalam mendukung pemenuhan gizi dan Pembangunan manusia.

Perbedaan: perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pendekatan dan fokus kajian. Penelitian terdahulu mengkaji Program Makan Bergizi Gratis secara normatif dan konseptual dengan menekankan pada urgensi serta tujuan kebijakan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi Program Makan Bergizi Gratis secara

[32] Andri Kusuma Jati, Azhar, Atrika Iriani. " Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia". *Ranah Research*., (2025):700-710.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

empiris di Kabupaten Jember, khusunya pada SPPG Desa Wonoasri. Penelitian ini menitikberatkan pada praktik pelaksanaan di lapangan, sehingga memberikan gambaran yang lebih konkret dan mendalam mengenai pelaksanaan program.

d. Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Bahri ZR dengan judul *"Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Di Kabupaten Pinrang (Analisis Diyasah Syar'iyyah)"*.[33]

Persamaan: penelitian ini sama – sama membahas Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan publik yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini melihat program tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga memiliki tujuan yang sama dalam menilai pentingnya pelaksanaan kebijakan tersebut.

Perbedaan: perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada perspektif dan fokus kajian. Penelitian terdahulu menekankan aspek kemaslahatan umum dan legitimasi kebijakan dari perspektif hukum islam. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada implementasi Program Makan Bergizi Gratis secara empiris di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jember, dengan fokus pada mekanisme

[33] SYAMSUL BAHRI ZR. " Retrieved from Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Syar'iyyah)., (2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelaksanaan, peran para aktor, serta dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dari sisi objek kajian, pendekatan penelitian, serta kedalaman analisis perspektif administrasi dan tata kelola pemerintah.

e. Jurnal yang ditulis oleh Trimerta Kirana Modok Laurensius P. Sayrani, Delila A.N. Seran, I Putu Yoga B. Pradana dengan judul *"Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Kota Kupang"*.[34]

Persamaan: Penelitian dalam artikel jurnal dan penelitian Anda sama-sama mengkaji pelaksanaan Program MBG sebagai program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat. Menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian saya juga menggunakan pendekatan empiris/kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang serupa. Penelitian ini melibatkan pihak SPPG, sekolah, dan siswa penerima manfaat sebagai informan penelitian. Penelitian ini menemukan adanya keterlambatan distribusi, kendala koordinasi, lemahnya dokumentasi, dan permasalahan pengawasan mutu makanan. sedangkan penelitian saya juga menemukan keterlambatan distribusi dan adanya bahan pangan yang kurang layak seperti buah busuk maupun ayam basi.

Perbedaan: penelitian ini lebih berfokus pada aspek tata kelola *(governance*), yaitu pengelolaan, transparansi, dan

[34] Trimerta Kirana Modok et al., "Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Kota Kupang". Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan., (2026):678-679.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akuntabilitas program MBG. Sedangkan penelitian saya lebih menitikberatkan pada implementasi penyaluran dan pengawasan Program MBG secara langsung di lapangan, termasuk mekanisme distribusi, kualitas makanan, pengawasan keamanan pangan, dan pelaksanaan program di SPPG. Penelitian ini menggunakan pendekatan governance, transparansi, dan akuntabilitas. Sedangkan penelitian saya menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, teori birokrasi Max Weber, *sociological jurisprudence* Roscoe Pound, dan teori pengawasan George R. Terry.

Tabel 2.1

Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Penulis & Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	*"Implementation Of The Free Nutritious Meal Policy In Bondowoso Regency"* Sarah Meirina Sari (2025)	Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Islam Terpadu Insan Cemerlang melibatkan perencanaan yang efektif melalui koordinasi antara unit pelaksanaan pemenuhan gizi dan sekolah. Program ini secara positif mempengaruhi kehadiran siswa dan kebiasaan sehat, meskipun tantangan seperti kapasitas	penelitian ini sama – sama mengkaji kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk melihat bagaimana pelaksanaan MBG ini di lapangan	lokasi, fokus, dan pendekatan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDIT Kuntum Insan Cemerlang, Kabupaten Bondowoso, dengan fokus pada implementasi program MBG di tingkat sekolah menggunakan perspektif administrasi publik. Sementara itu, penelitian

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Judul, Nama Penulis & Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		transportasi yang terbatas dan jadwal distribusi makanan yang tidak selaras dicatat. Pemantauan termasuk inspeksi lapangan dan evaluasi online, tetapi efektivitas terhambat oleh kendala anggaran dan kapasitas kelembagaan, yang memerlukan perbaikan tata kelola dan kapasitas sumber daya untuk berkelanjutan.	dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode untuk melakukan wawancara, observasi, dan dokumen sebagai perbandingan. Penelitian ini juga mencakup penetapan sasaran, pengaturan pendistribusian makanan, serta identifikasi kebutuhan peserta didik. Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward yang mencakup tiga dimensi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.	penulis dilakukan di Kabupaten Jember dengan fokus pada peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana teknis program MBG. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, berbeda dari aspek hukum dan tata kelola pemerintah.
2.	*"Tantangan dan Strategi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Banten"* Angga Rosidin, Jaka Maulana, dan Awan Dharmawan (2025)	Program MBG telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kehadiran siswa, semangat belajar, dan konsentrasi siswa di sekolah. Anak-anak menjadi lebih termotivasi mengikuti pembelajaran karena memperoleh makanan bergizi	penelitian ini sama – sama membahas implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat. Fokus kajian diarahkan pada proses pelaksanaan program serta berbagai tantangan	perbedaan utama antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tingkat analisis dan cakupan wilayah penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada tantangan dan strategi implementasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Judul, Nama Penulis & Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		secara rutin. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama meliputi koordinasi antarlembaga yang belum optimal, distribusi makanan yang tidak konsisten, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya pengawasan kualitas makanan oleh Dinas Kesehatan. Guru bahkan harus membantu proses distribusi makanan karena kurangnya tenaga pengawas khusus. Diharapkan pemerintah daerah dapat memperketat pada sistem pengawasan.	yang muncul dalam implementasinya, sehingga baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini berupaya memeberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan tersebut di lapangan.	Program Makan Bergizi Gratis di tingkat Pemerintah Provinsi Banten dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Sementara itu penelitian ini memfokuskan kajian empiris pada tingkat unit pelaksana, yaitu SPPG Desa Wonoasri di Kabupaten Jember, dengan menekankan pada dinamika pelaksana di lapangan. Fokus tersebut memungkinkan penelitian ini memberikan gambaran yang lebih konkret dan mendalam mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis.
3.	*"Formulasi kebijakan pemerintah tentang program makan bergizi gratis di indonesia"*. Andri Kusuma Jati, Azhar, dan	Tingginya angka stunting di indonesia yang mencapai 21,6% pada tahun 2022, ketimpangan akses pangan bergizi, serta dampak kekurangan gizi	penelitian dalam artikel ini sama – sama mengkaji Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan	perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pendekatan dan fokus kajian. Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Judul, Nama Penulis & Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Atrika Iriani (2025)	terhadap kemampuan belajar anak. Anak yang mengalami malnutrisi cenderung memiliki konsentrasi belajar rendah, mudah lelah, dan berisiko mengalami penurunan prestasi akademik. Pemerintah akhirnya menadopsi kombinasi penyediaan makanan di sekolah dan kerja sama dengan UMKM lokal untuk mendukung distribusi makanan sekaligus pemberdayaan ekonomi Masyarakat. Tahap adopsi kebijakan diperkuat melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Gizi Nasional No. 3 Tahun 2024, Intruksi Presiden Tahun 2025, serta Pengalokasian Anggaran dalam APBN dan APBD 2025. Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan petani dan UMKM lokal untuk memastikan bahan	kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini menempatkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan strategis yang memiliki urgensi penting dalam mendukung pemenuhan gizi dan Pembangunan manusia.	terdahulu mengkaji Program Makan Bergizi Gratis secara normatif dan konseptual dengan menekankan pada urgensi serta tujuan kebijakan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi Program Makan Bergizi Gratis secara empiris di Kabupaten Jember, khusunya pada SPPG Desa Wonoasri. Penelitian ini menitikberatkan pada praktik pelaksanaan di lapangan, sehingga memberikan gambaran yang lebih konkret dan mendalam mengenai pelaksanaan program.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Judul, Nama Penulis & Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		pangan bergizi.		
4.	*"Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Di Kabupaten Pinrang (Analisis Diyasah Syar'iyyah)"* Syamsul Bahri ZR (2025)	Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Pinrang melibatkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Ini mengumpulkan partisipasi yang signifikan dari sekolah dan orang tua dan UMKM lokal berkontribusi positif pada perekonomian lokal. Program ini di dukung oleh kerangka hukum, termasuk UU No. 18/2012 tentang pangan dan UU No. 17/2023 tentang Kesehatan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Menyelaraskan dengan prinsip-prinsip syariah dengan meningkatkan Kesehatan, mengurangi stunting, dan meningkatkan sumber daya manusia generasi	penelitian ini sama – sama membahas Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan publik yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini melihat program tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga memiliki tujuan yang sama dalam menilai pentingnya pelaksanaan kebijakan tersebut.	perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada perspektif dan fokus kajian. Penelitian terdahulu menekankan aspek kemaslahatan umum dan legitimasi kebijakan dari perspektif hukum islam. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada implementasi Program Makan Bergizi Gratis secara empiris di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jember, dengan fokus pada mekanisme pelaksanaan, peran para aktor, serta dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Judul, Nama Penulis & Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		muda.		kebaruan dari sisi objek kajian, pendekatan penelitian, serta kedalaman analisis perspektif administrasi dan tata kelola pemerintah.
5.	*"Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Kota Kupang"* Trimerta Kirana Modok Laurensius P. Sayrani, Delila A.N. Seran, I Putu Yoga B. Pradana (2026)	Dalam artikel ini membahas pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai realisasi janji politik pemerintahan Prabowo-Gibran setelah pemuli 2024. Penelitian ini menggunakan teori mandat dari Hanna F. Pitkin untuk menilai apakah program MBG benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dalam perspektif teori mandat Hanna F. Pitkin, pemerintah dianggap memiliki kewajiban moral dan politik untuk memenuhi janji kampanye sebagai bentuk mendat rakyat. Oleh karena itu, program MBG tidak boleh hanya	Penelitian dalam artikel jurnal dan penelitian Anda sama-sama mengkaji pelaksanaan Program MBG sebagai program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat. Menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian saya juga menggunakan pendekatan empiris/kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang serupa. Penelitian ini melibatkan pihak SPPG, sekolah, dan siswa penerima manfaat sebagai informan penelitian. Penelitian ini menemukan adanya	penelitian ini lebih berfokus pada aspek tata kelola (governance), yaitu pengelolaan, transparansi, dan akuntabilitas program MBG. Sedangkan penelitian saya lebih menitikberatkan pada implementasi penyaluran dan pengawasan Program MBG secara langsung di lapangan, termasuk mekanisme distribusi, kualitas makanan, pengawasan keamanan pangan, dan pelaksanaan program di SPPG. Penelitian ini menggunakan pendekatan governance, transparansi, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Judul, Nama Penulis & Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		menjadi symbol politik, tetapi harus mewujudkan melalui kebijakan yang efektif, transparan, akuntabel, dan benar-benar memenuhi kebutuhan Masyarakat.	keterlambatan distribusi, kendala koordinasi, lemahnya dokumentasi, dan permasalahan pengawasan mutu makanan. sedangkan penelitian saya juga menemukan keterlambatan distribusi dan adanya bahan pangan yang kurang layak seperti buah busuk maupun ayam basi.	akuntabilitas. edangkan penelitian saya menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, teori birokrasi Max Weber, *sociological jurisprudence* Roscoe Pound, dan teori pengawasan George R. Terry.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai Program Makan Bergizi Gratis masih berfokus pada aspek implementasi, efektivitas, maupun evaluasi program secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji tata kelola Program Makan Bergizi Gratis pada tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana teknis program masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menggambarkan secara mendalam bagaimana pelaksanaan tata kelola program berlangsung pada tingkat pelaksana dengan mempertimbangkan kondisi empiris di daerah. Atas dasar tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut melalui kajian mengenai tata kelola Program Makan Bergizi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gratis di SPPG Desa Wonoasri Kabupaten Jember. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis tata kelola program pada tingkat SPPG berdasarkan kondisi faktual di lapangan, sehingga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus menjadi bahan masukan bagi penyelenggaraan program yang lebih optimal.

B. Kajian Teori

a. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah intrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *"government"* yang hanya menyangkut aparatur negara, tetapi juga *"governance"* yang menyangkut pada pengelolaan sumber daya publik dalam menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat. Model implementasi kebijakan publik sebagaimana disampaikan oleh George C. Edward III dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edward III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.[35]

[35] Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press,2020), 4-6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam pandangan Edward III, kebijakan publik pada dasarnya merupakan bentuk intervensi negara untuk memenuhi kepentingan masyarakat, yang pelaksanaannya melibatkan aktor, struktur organisasi, produser kerja, serta sumber daya saling berkaitan.[36] Oleh karena itu, kebijakan publik selalu berkaitan erat dengan tata kelola (*governance)*, yaitu bagaimana kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan diatur dan dijalankan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.[37]

Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan publik dapat dipahami sebagai kebijakan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas makanan bergizi secara tersetruktur dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak dasar atas pangan dan gizi, tetapi juga menunjukkan bagaimana kebijakan pubik diwujudkan melalui sistem pelaksanaan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga satuan pelaksana di tingkat lokal.

Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan bentuk konkret dari implementasi kebijakan publik tersebut di tingkat operasional. SPPG berfungsi sebagai unit

[36] Ibrahim Kristofol Kendi, *Implementasi Kebijakan Publik, Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari (Anggota IKAPI) Bandung—Indonesia, 2023).

[37] Fauzan, *Birokrasi Dan Publik Governance* (Yogyakarta: CV. Istana Agency Anggota IKAPI No.138/ Diy/ 2021, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelaksana yang menjembatani kebijakan nasional dengan realitas di lapangan, sehingga tata kelola dalam SPPG mulai dari perencanaan, pendistribusian, pengawasan, hingga pertanggung jawaban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik kebijakan publik itu sendiri.

Menurut pemahaman kebijakan publik Edward III dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran bahwa kebijakan publik seperti Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berhenti pada rumusan kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga hidup dan bekerja melalui tata kelola pelaksanaan di satuan pelayanan seperti SPPG Desa Wonoasri di Kabupaten Jember. Pemahaman ini penting agar dapat melihat bahwa kebijakan publik adalah proses yang menyeluruh, mulai dari kebijakan sebagai keputusan negara hingga kebijakan sebagai praktik pelayanan kepada masyarakat.

b. Teori Hukum Sosiological Jurisprudence

Sosiological Jurisprudence yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi juga melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum (terkenal dengan konsep bahwa *law as a tool of social enginnering*). *Roscoe Pound* yang mengeluarkan teori hukum adalah alat untuk merekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) juga menganjurkan supaya ilmu sosial didayagunakan untuk kemajuan dan pengembangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ilmu hukum. Sebagai pemikir *sociological jurisprudence,* Pound mengusulkan agar para ahli hukum beraliran sosiologis perlu lebih mempertimbangkan fakta sosial dalam pekerjaannya, apakah pembuatan hukum, penafsiran, atau penerapan peraturan. Sebab bagi Pound kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya. Fokus utama pound dengan konsep *social engineering* adalah *interest balancing* dan karenanya yang terpenting adalah tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju.[38]

Hukum sebagai sarana *social engineering* bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana di cita–citakan, atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Hukum tidak lagi dilihat sebagai tatanan penjaga *status quo,* tetapi juga diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan–tujuan tertentu secara terencana.[39]

Dalam perspektif *sociological jurisprudence* yang dikemukakan Roscoe Pound, hukum seharusnya berfungsi sebagai alat rekayasa (*law as a tool of social engineering*) untuk mewujudkan tujuan sosial tertentu. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi penyaluran Program

[38] Agus Wibowo, *Teori Sosiologi Hukum.* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bersama Universitas Sains dan Teknologi Komputer, 2024).

[39] Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Divisi Dari Prenadamedia Group, 2016), 57 – 64.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Makan Bergizi Gratis, hukum belum sepenuhnya bekerja secara efektif, sebagaimana terlihat dari keterlambatan pendistribusian serta kualitas makanan yang tidak layak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Tujuan hukum dalam penelitian ini adalah untuk menilai apakah hukum dan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis telah berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan sosialnya, yaitu pemenuhan gizi, perlindungan kesehatan, dan kepentingan penerima manfaat. Teori *sociological jurisprudence* digunakan karena teori ini menilai hukum tidak hanya dari keberadaan norma, tetapi dari pelaksanaannya dalam masyarakat. Dengan pendekatan *law as a tool of social engineering,* penelitian ini menganalisis apakah implementasi penyaluran dan pengawasan telah mampu mengarahkan praktik pelaksanaan program sesuai dengan tujuan hukum yang di cita–citakan, atau justru menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum dan ralitas sosial.

c. Teori Birokrasi Max Weber

Max Weber adalah sosiolog dan pemikir Jerman yang dikatakan sebagai bapak model pemerintahan yang paling terpelajar dalam teori organisasi. Birokrasi Weber didasarkan pada hubungan antara kekuasaan yang diberikan kepada delegasi yang ditujukan untuk mengawasi kegiatan dan kewajiban perintah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tertulis, adanya aturan yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan, promosikan posisi yang sesuai dengan aturan tertentu. Sistem operasi Weberian dipahami sebagai sebuah biro. Suatu biro merupakan jawaban atas kesadaran untuk tujuan tertentu. Ini adalah cara lain untuk mencapai tujuan.[40]

Model birokrasi Weberian masih diahami secara luas sebagai senjata yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, setiap PNS tidak mempunyai pekerjaan lain selain tugas dan tugas yang dibebankan kepadanya. Selama fungsi dan fungsi sebagai mesin dijalankan secara rencana dan terorganisir, fungsi instansi pemerintah terpenuhi. Birokrasi yang digambarkan oleh Weber memiliki banyak keunggulan. Misalnya, pembagian kerja mengarah pada kesuksesan. Panel kontrol memberi anda kendali atas situasi yang berbeda dan mendorong ketertiban yang baik. Aturan main yang dapat menjamin kelangsungan kegiatan pemerintah, bahkan jika otoritas berubah, dan dengan demikian mendorong perilaku yang tertib.[41]

Dalam teori birokrasi ideal (*ideal type of bureaucracy*) Max Weber, umumnya terdapat 6 karakteristik/variabel utama yang sering dikutip dalam literatur administrasi publik dan sosiologi organisasi (beberapa penulis memecahnya menjadi 7 dengan

[40] Hermanu Iriawan, *Birokrasi Indonesia* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024).

[41] Hadi Prabowo, *Birokrasi dan Pelayanan Publik* (Padalarang - Bandung Barat: Bimedia Pustaka Utama, 2022), 27 – 38.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memisahkan "seleksi formal" dari "orientasi karir"). Berikut penjelasan rinci masing-masing variabel:

1. Pembagian Kerja dan Spesialisasi *(Division of Labor)*. Setiap posisi dalam organisasi memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dan terspesialisasi. Pekerjaan dipecah menjadi tugas-tugas rutin yang terdefinisi sehingga pegawai dapat menjadi ahli di bidangnya masing-masing. Spesialisasi ini meningkatkan efisiensi karena setiap orang fokus pada kompetensi tertentu.
2. Hierarki Wewenang *(Hierarchy of Authority)*. Organisasi disusun secara vertikal berjenjang, di mana setiap tingkat jabatan yang lebih rendah berada di bawah kendali dan pengawasan tingkat yang lebih tinggi. Struktur ini menciptakan rantai komando (*chain of command*) yang jelas, memastikan akuntabilitas dan koordinasi antar level organisasi.
3. Sistem Aturan dan Prosedur Formal *(Formal Rules and Regulations)*. Semua aktivitas organisasi diatur oleh sistem aturan tertulis yang konsisten dan berlaku umum (abstrak). Aturan ini bertujuan menjamin keseragaman tindakan, mengurangi ketidakpastian, dan memastikan setiap keputusan dapat diprediksi serta dipertanggungjawabkan.
4. Impersonalitas *(Impersonality)*. Hubungan antar anggota organisasi maupun dengan klien/masyarakat didasarkan pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

aturan formal, bukan pada hubungan personal, emosional, atau favoritisme. Pejabat bertindak sesuai posisi/jabatannya (*sine ira et studio* tanpa kebencian maupun kegemaran), bukan atas dasar preferensi pribadi.

5. Orientasi Karir Berdasarkan Kompetensi *(Career Orientation/Merit System).* Rekrutmen, promosi, dan penempatan pegawai didasarkan pada kualifikasi teknis, keahlian, dan prestasi kerja (*merit*), bukan pada faktor keturunan, kedekatan, atau afiliasi politik. Pegawai bekerja sebagai profesi tetap (karier) dengan sistem penggajian dan jaminan yang terstruktur.
6. Dokumentasi Tertulis *(Written Documentation/Files).* Seluruh keputusan, tindakan administratif, dan aturan dicatat secara tertulis dan diarsipkan secara sistematis. Dokumen ini menjadi dasar bagi kesinambungan organisasi, transparansi, dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas setiap tindakan yang diambil.[42]

Teori Birokrasi Max Weber relavan dengan penelitian ini karena teori tersebut menjelaskan bagaiamana aparatur pemerintahan seharusnya diorganisasi dan dikendalikan dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Implementasi penyaluran dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian

[42] Thoha, Miftah, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 89-97.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari kerja birokrasi pemerintahan yang menuntut pembagian tugas yang jelas, kepatuhan terhadap atran tertulis, serta pengawasan hierarkis yang efektif. Temuan berupa keterlambatan pengawasan menunjukkan bahwa prinsip–prinsip birokrasi legal sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber belum terlaksana secara optimal.

Bentuk organisasi pengawasan dalam kebijakan ini seharusnya mengikuti prinsip birokrasi rasional legal sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber yaitu adanya kejelasan kewenangan, hierarki pengawasan, pembagian tugas yang tegas, serta pengawasan berbasis aturan tertulis. Penelitian ini tidak merncang struktur baru, tetapi menganalisis sejauh mana prinsip tersebut telah atau belum berjalan dalam praktik pengawasan Program Makan Bergizi Gratis.

d. Teori Pengawasan George R. Terry

Menurut George R. Terry, pengawasan *(controlling)* adalah suatu proses untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi pelaksanaan, serta mengambil tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan dari rencana yang telah ditentukan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.[43]

[43] Dewi, A. D. M., & Sahal, Y. F. D, *The Perspective of Islamic Education Management is Seen from The Management of George R. Terry*, (*An-Nuha*, *3*(1)), 1–16. https://doi.org/10.63005/annuha.v3i1.1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam pelaksanaannya, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak di dalam organisasi itu sendiri, seperti pimpinan atau unit pengawasan internal adalah mendeteksi secara dini adanya penyimpangan serta memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.[44]

Sementara itu, pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi, seperti lembaga pemerintah, lembaga pengawas independen, maupun masyarakat. Pengawasan ini bersifat lebih objektif karena dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan eksternal berperan penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan penilian yang lebih independen terhadap kinerja organisasi.

Kedua bentuk pengawasan tersebut memiliki peran yang saling melengkapi. Pengawasan internal berfungsi untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan, sedangkan pengawasan eksternal berfungsi sebagai mekanisme kontrol tembahan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan

[44] Rahmawati Sururama, *Pengawasan Pemerintahan* (Bandung: Penerbit Cendekia Press-Bandung, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wewenang. Dengan adanya kombinasi antara pengawasan internal dan eksternal, maka suatu sistem pengelolaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum terhadap peristiwa, kejadian, dan perbuatan nyata yang terjadi dalam masyarakat.[45] Pendekatan dan jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya pada aspek implementasi penyaluran dan pengawasan, yang mana tidak hanya dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dan SOP Kementerian Kesehatan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis, melainkan harus dilihat berdasarkan kondisi nyata yang dialami oleh pihak pelaksana dan penerima manfaat.

Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum (yuridis-sosiologis) dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum dengan model penelitian yuridis-sosiologis dan peraturan perundang-undangan ini mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah

[45] Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Jakarta: Kencana Divisi Dari Prenadamedia Group. (2016):149–154.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Penilitian yuridis-sosiologis digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sosiologi hukum mencoba menjelaskan mengenai efektivitas hukum sebagai bentuk interaksi antar aturan perundang-undangan ketika dilaksanakan dalam masyarakat.[46]

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami bagaimana aturan tersebut mengatur kewenangan, tugas, mekanisme pelaksanaan, hingga pengawasan[47] selain itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan dan menganalisis aturan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[48] Program MBG di SPPG Desa Wonoasri. Dengan demikian, penelitian tidak hanya melihat fenomena empiris di lapangan, tetapi juga mengkaji apakah implementasi program telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Wonoasri, yang berlokasikan di Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Lokasi ini dipilih karena SPPG Desa Wonoasri merupakan salah satu unit pelaksana Program

[46] Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Jakarta: Kencana Divisi Dari Prenadamedia Group. (2016):152.

[47] Utomo, N. A. (2016). *Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia*. *13*(4), 886–910.

[48] Nur Solikin., "PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM". Pasuruan-Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media., (2021):58-59.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Makan Bergzi Gratis (MBG) yang secara langsung bertanggung jawab terhadap implementasi penyaluran makanan kepada sekolah penerima manfaat di wilayah pedesaan. Pemilihan SPPG Wonoasri sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut pernah ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program, seperti keterlambatan pendistribusian dan kualitas makanan, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dipilih sebagai sumber data karena memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian mengenai tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Desa Wonoasri Kabupaten Jember. Penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposive, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui, mengalami, dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Tim Persiapan 1 SPPG Desa Wonoasri Ibu Sulastri sebagai informan 1, yang berperan dalam proses persiapan bahan pangan dan mengetahui mekanisme pelaksanaan program.
b. Tim Pemorsian 1 SPPG Desa Wonoasri Ibu Nur Habibah sebagai informan 2, yang bertugas dalam proses pemorsian makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Penerima Manfaat yaitu yayasan Nurussalam Bapak Farhan Saputra sebagai penannggung jawab di sekolah serta pihak yang menerima makanan dan berinteraksi langsung dengan pelaksanaan program di sekolah.
d. Ibu Winarsih sebagai wali murid penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
e. Ibu Tutik sebagai wali murid penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
f. Ibu Tinah sebagai wali murid penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.

Kelima informan tersebut dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sehingga mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian hukum empiris dan fokus penelitian pada implementasi penyaluran serta pengawasan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Desa Wonoasri. Adapun teknik pengumpulan data meliputi:

a. Wawancara, wawancara mendalam dilakukan kepada pihak – pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Wawancara mendalam yang saya gunakan merupakan wawancara semi-terstruktur, karena saya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

telah menyiapkan pedoman wawancara berdasarkan fokus penelitian. Namun, selama proses wawancara saya mengembangkan pertanyaan sesuai jawaban narasumber agar memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Melalui wawancara mendalam, data yang diperoleh meliputi:

- Proses penyaluran makanan, termasuk jadwal dan mekanisme pendistribusian.
- Penanganan bahan pangan dan makanan jadi sebelum didistribusikan.
- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, seperti keterlambatan distribusi dan kualitas makanan.
- Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh SPPG dan pihak sekolah.
- Respon dan tindak lanjut apabila ditemukan permasalahan dalam penyaluran makanan.

b. Studi Dokumen, melalui studi dokumen peneliti memperoleh data mengenai standar pelayanan, standar keamanan pangan, serta mekanisme pengawasan yang seharusnya diterapkan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, studi dokumen digunakan untuk memahami ketentuan normatif yang menjadi dasar pelaksanaan program serta sebagai pembanding

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap praktik di lapangan. Adapun dokumen yang dikaji dalam penelitian ini meliputi:

- Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis
- Petunjuk Teknis tentang penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
- SOP Kementerian Kesehatan terkait keamanan pangan siap saji pada Program Makan Bergizi Gratis
- Dokumen pendukung lain yang relavan dengan pelaksanaan dan pengawasan program.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara empiris dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Desa Wonoasri berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan studi dokumen. Data hasil wawancara mendalam dicatat dan ditranskripsikan secara lengkap, sementara data dokumen dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sumbernya. Pada tahap ini, peneliti memastikan bahwa seluruh data yang relavan dengan fokus penelitian, yaitu implementasi penyaluran dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis telah terhimpun secara menyeluruh. Data yang telah diatur selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan kategori analisis yang telah ditentukan, yaitu kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

115 Tahun 2025 serta SOP Kementerian Kesehatan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintan untuk Program Makan Bergizi Gratis. Klasifikasi data dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam kategori "sesuai" dan "belum sesuai" terhadap standar hukum yang berlaku, khususnya aspek waktu pendistribusian, kualitas makanan dan keamanan makanan, serta mekanisme pengawasan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk menjamin bahwa data dan temuan yang diperoleh benar–benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, peneliti ini menekankan pada kredibilitas data hasil penelitian. Untuk mencapai keabsahan data tersebut, peneliti menggunakan beberapa tekni pengumpulan data sebagai berikut:

a. Peneliti melakukan perpanjangan kehadiran di lapangan dengan cara menyalin komunikasi dan melakukan wawancara secara berulang dengan subyek penelitian. Meskipun peneliti tidak melakukan observasi langsung karena adanya pembatasan akses kebersihan di area SPPG, perpanjangan kehadiran dilakukan melalui pendalaman wawancara dan klarifikasi informasi pada waktu yang berbeda. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang konsisten serta menghindari kesalah pahaman terhadap informasi yang disampaikan oleh informan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Triangulasi digunakan untuk mengkaji keabsahan data dengan cara membandingkan data dari berbagai sudut pandang. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data yang diperoleh dari kepala SPPG, petugas pendistribusian, dan pihak sekolah penerima manfaat. Melalui perbandingan antar sumber tersebut, peneliti dapat menilai konsistensi informasi terkait implementasi penyaluran dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis. Selain triangulasi sumber, peneliti juga menggunakan triangulasi teknik dengan membandingkan data hasil wawancara mendalam dengan data yang diperoleh melalui studi dokumen, seperti Prespes No. 115 Tahun 2025 dan SOP Kementerian Kesehatan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis. Triangulasi ini bertujuan untuk melihat kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Dengan menggunakan berbagai teknik keabsahan data tersebut, diharapkan hasil penelitian ini memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan mampu menggambarkan secara akurat implementasi penyaluran dan pengawasan program makan bergizi gratis di SPPG Desa Wonoasri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan secara sistematis yang dimulai dari penelitian pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah dan memperoleh gambaran awal penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan desain penelitian melalui penyusunan metode, instrumen, dan penentuan informan penelitian. Selanjutnya, dilakukan penelitian sebenarnya melalui proses pengumpulan data dan analisis data di lapangan. Tahap terakhir yaitu penulisan laporan penelitian yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan analisis data sehingga menghasilkan laporan skripsi yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selanjutnya disngkat SPPG adalah unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPPG. SPPG memiliki peran utama dalam memastikan bahwa proses penyediaan makanan bergizi kepada penerima manfaat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik dari segi kualitas, keamanan pangan, maupun ketetapan distribusi.[49]

Dalam menjalankan tugasnya, SPPG Desa Wonoasri memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa unsur pelaksana yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Struktur ini dibentuk untuk memastikan adanya pembagian kerja yang jelas serta koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan program.

1. Komposisi jumlah tenaga kerja relawan total 50 orang:
    a. Kepala SPPG 1 orang
    b. Pengawas produksi dan kualitas (ahli gizi) 1 orang
    c. Pengawas pengadaan bahan pangan (akuntan) 1 orang
    d. Pengawas pemeliharaan dan pengantaran 1 orang
    e. Persiapan bahan pangan 4 orang

[49] Setneg RI, PERPRES No. 115 Tahun 2025, pasal 1 ayat (19).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

f. Pengolahan bahan makanan 10 orang

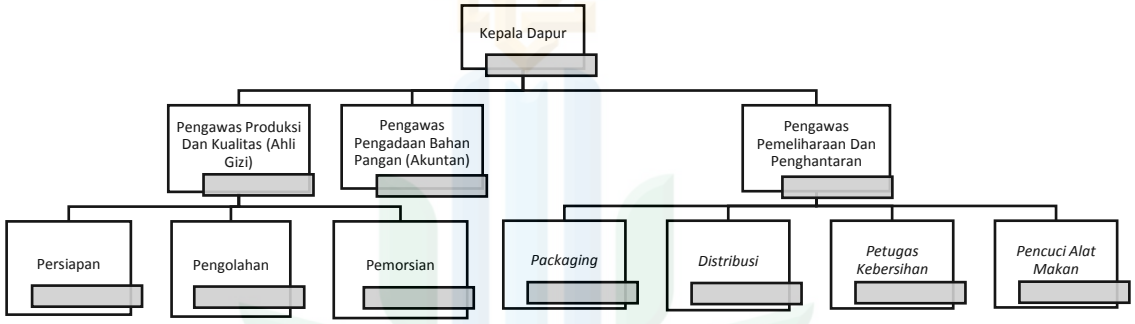
g. Pemorsian 9 orang

h. *Packing* 1 orang

i. Distribusi 4 orang.[50]

2. Struktur organisasi

Struktur organisasi terlampir sesuai dengan gambar di bawah ini:



Gambar 4.1
Struktur Pengorganisasi Pekerja SPPG[51]

3. Tugas dan tanggung jawab

a. Gambaran umum

1) Melayani dan bekerja dengan sepenuh hati

2) Menggunakan seragam sesuai aturan yang berlaku

3) Menjaga dan memebersihkan area kerja

4) Menjaga etika, sopan, dan santun selama kerja

5) Patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku

6) Menjaga dan memelihara barang inventaris unit pelayanan

[50] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 35.
[51] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 35.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7) Mematuhi regulasi keamanan makanan dan pengolahan limbah

b. Kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi

1) Mengawasi kinerja dan pengembangan tim, menetapkan jadwal kerja, dan mengelola konflik.
2) Mengatur operasional harian dari mulai produksi hingga distribusi
3) Menjaga stnadar kualitas makanan, pelayanan, dan kebersihan
4) Mengelola persediaan bahan mentah dan peralatan, serta melakukan pemesanan untuk memastikan kecukupan stok.
5) Memantau anggaran, mengontrol biaya operasional, dan memastikan semua berjalan sesuai tugas dan fungsinya
6) Melakukan monitoring dan evaluasi setiap seminggu sekali kepada seluruh karyawan di unit pelayanan
7) Melakukan *quality control* terhadap bahan baku yang digunakan
8) Selalu melakukan asset management terhadap barang yang dimiliki
9) Selalu melakukan pengawasan terhadap sanitasi lingkungan, serangan dari hama pemukiman, hama gudang, dan sebulan sekali elakukan pembersihan massal.[52]

c. Pengawas produksi dan kualitas (ahli gizi)

[52] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 35.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Pengembangan menu berkolaborasi dengan tim dapur untuk merancang menu yang bergizi seimbang sesuai dengan peraturan yang berlaku
2) Labelisasi nutrisi, menghitung, dang menyediakan informasi gizi untuk setiap hidangan atau menu, termasuk kalori, protein, lemak, karbohidrat, dan gizi lainnya
3) Menyediakan konsultasi gizi secara langsung dan tidak dipungut biaya kepada siswa/i yang memiliki pertanyaan tentang nutrisi makanan yang mereka konsumsi
4) Pelatihan dan edukasi kepada staf unit pelayanan tentang prinsip-prinsip dasar gizi dan penanganan makanan yang aman
5) Pengawasan kualitas untuk memastikan bahwa standar gizi dan kualitas makanan terjaga sesuai dengan pedoman gizi yang disetujui
6) Kepatuhan peraturan untuk memamstikan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah tentang labelisasi nutrisi dan aspek kesehatan liannya yang berlaku
7) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari karyawan khususnya bagian persiapan, pengolahan, dan pemorsian
8) *Quality control* terhadap makanan yang diproduksi setiap harinya
9) Bertanggung jawab dalam pengawasan dan pencatatan sample maknanan (*safety food*) setiap harinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Pengawas pengadaan bahan pangan (akuntan)
    1) Berkoordinasi dengan kepala unit untuk membuat rencana anggaran belanja setiap harinya
    2) Bertanggung jawab terhadap sistem operasional laporan pendistribusian (pawon atau pos)
    3) Manajemen operasinal untuk memastikan operasional harian berjalan lancar, termasuk persediaan, pemesanan, dan kebersihan
    4) Bertanggung jawab dalam pencatatan keuangan, termasuk pemasukan dan pengeluaran
    5) Pengaturan personel yaitu mengatur jadwal karyawan, pelatihan, dan manajemen kerja
    6) Membantu mencatat secara administrasi untuk kebutuhan operasional setiap harinya
    7) Bertanggung jawab terhadap catatan sampah yang dihasilkan setiap harinya, baik sampah organik dari unit pelayanan atau sampah organik sisa dari sekolah
    8) Mencatat ketersediaan stok di unit pelayanan
    9) Membuat laporan keuangan pada setiap per 2 minggu, laporan bulanan dan laporan tahunan.[53]
e. Pengawas pemeliharaan dan penghantaran (asisten lapangan)

[53] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 36.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Sebagai pelaksana terdepan menjalin hubungan dengan pihak eksternal khususnya dengan pihak sekolah
2) Memastikan proses produksi berjalan lancar tidak ada halangan serta selesai sesuai waktu yang sudah ditentukan
3) Memastikan ketersediaan bahan dan baku untuk produksi
4) Bertanggung jawab terhadap update jumlah porsi produksi dan di distribusikan setiap harinya
5) Memastikan hubungan ke pihak sekolah berjalan dengan harmonis dan pro aktif
6) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari bagian *packaging,* distribusi, petugas kebersihan, dan pencuci alat makan
7) Bertanggung jawab dalam mengatur pengeluaran operasional selama kegiatan (bensin, gas, dan lainnya)
8) Bertanggung jawab terhadap *quality control,* pencatatan dan penimbangan bahan baku yang masuk ke unit pelayanan

f. Persiapan bahan makanan

1) Memastikan ketersediaan bahan baku
2) Memberihkan, mengupas, memotong sayuran dan bumbu
3) Menghitung dan mencatat kebutuhan baku, misal 1 kg wortel buat berapa porsi
4) Menghitung dan mencatat sampah dari sayuran yang digunakan
5) Membersihkan lingkungan pekerjaan di sekitar ruangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6) Memastikan bahan baku yang digunakan higienis

g. Pengolahan bahan makanan

1) Produksi nasi

- Memastikan ketersediaan nasi
- Menghitung dan mencatat satu kali produksi nasi menjadi berapa porsi
- Memastikan beras yang dimasak sudah dicuci dan higienis
- Memastikan ketersediaan stok beras
- Membersihkan alat produksi nasi dan lingkungan pekerjaan sebelum ditinggalkan

2) Produksi sayur

- Memastikan ketersediaan bahan baku rempah-rempah, dan sayuran
- Memastikan ketersediaan sayur ketika proses pemorsian
- Mencatat dan menghitung kesanggunpan produksi 1 wajan
- Mencatat dan menghitung setiap bumbu yang digunakan seperti minyak, garam, gulan, dan sejenisnya
- Membersihkan alat produksi sayuran dan lingkungan pekerjaan sebelum ditinggalkan

3) Produksi lauk

- Memastikan ketersediaan bahan baku rempah-rempah dan lauk
- Memastikan ketersediaan lauk ketika proses pemorsian
- Mencatat dan menghitung kesanggupan produksi 1 wajan
- Mencatat dan menghitung setiap bumbu yang digunakan seperti minyak, garam, gula dan lainnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- Melakukan pengecekan dan perhitungan terhadap bahan baku lauk seperti ayam, ikan, daging, telur yang dikirim oleh pemasok
- Membersihkan alat produksi lauk dan lingkungan pekerjaan sebelum ditinggalkan.[54]

h. Pemorsian

1) Memastikan ketersediaan dari tempat makan beserta tutupnya
2) Memastikan ketersediaan makanan seperti susu, nasi, lauk, dan buah
3) Bertanggung jawab terhadap *quality control* dari buah (sortir dan timbang ketika buah datang)
4) Bertanggung jawab dan memastikan tempat makan terisi semua (nasi, lauk, sayur, buah, dan susu)
5) Memastikan area kerja tersusun rapih, bersih, dan higienis
6) Melakukan stok *opname* dari bahan baku seperti susu dan buah, melakukan *asst management* alat makan beserta tutupnya
7) Memebersikan alat peralatan pemorsian dan lingkungan pekerjaan sebelum ditinggalkan

i. Packing

1) Memastikan area lingkungan kerja rapih, bersih, dan higienis
2) Bertanggung jawab dalam *packing* (disusun 10 tier) menggunakan tali rapia
3) Memastikan ketersediaan tali rapia setiap harinya

[54] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 37.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4) Bertanggung jawab utuk memindahkan makanan dari ruang *packing* ke ruang distribusi yang sudah disusun 10 tier
5) Memastikan makanan tidak ada yang tumpah
6) Membersihkan alat peralatan *packing* dan lingkungan pekerjaan sebelum ditinggalkan

j. Distribusi

1) Memastikan kendaraan dalam keadaan bersih, rapi, dan higienis
2) Bertanggung jawab menaikkan dan mendistribusikan makanan
3) Bertanggung jawab dan memastikan makanan selama proses pendistribusian tidak ada yang tumpah dan rusak
4) Memastikan setiap sekolah penerima manfaat mendapatkan porsi makanan sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan ditunjang dengan bukti yang konkret dan standar operasional yang sudah ditentukan
5) Bertanggung jawab mengambil alat makan yang kotor di sekolah dan mendistribusikan ke tempat pencucian
6) Bertanggung jawab membawa tempat makan yang bersih dari temoat oencucian ke unit pelayanan
7) Bertanggung jawab membawa, mengisi, mengamankan, dan memeberikan surat jalan kepada koordinator lapangan.[55]

[55] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 38.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Penyajian dan Analisis Data

a. Implementasi Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Desa Wonoasri Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, implementasi penyaluran Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Desa Wonoasri dilaksanakan melalui beberapa tahapan pelaksanaan yang saling berkaitan. Berikut hasil wawancara kepada staf SPPG dan penerima manfaat yaitu MTs Nurussalam.

> Dimulai dari tim persiapan semisal ada menu yang sulit jam 4 sore berangkat, tim pengolahan jam 12 malam mulai masuk dapur dan jam 1 mulai mengolah, tim pemorsian jam 3 dini hari, tim pendistribusian mulai berangkat jam 06.30 WIB.[56]

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dilakukan melalui pembagian tugas yang terstruktur dan berlangsung secara berkesinambungan selama 24 jam. Proses dimulai dari tim persiapan yang bertugas menyiapkan bahan dan kebutuhan produksi. Apabila menu yang akan diolah tergolong sulit atau membutuhkan waktu pengolahan lebih lama, maka tim persiapan sudah mulai berangkat dan bekerja sejak pukul 16.00 WIB. Hal ini menunjukkan adanya bentuk antisipasi dan perencanaan teknis agar proses produksi makanan dapat selesai tepat waktu. Kemudian, tim pendistribusian mulai berangkat 06.30 WIB untuk menyalurkan makanan ke sekolah atau titik penerima manfaat. Waktu

[56] Sulastri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendistribusian dilakukan pada pagi hari menunjukkan bahwa pelaksanaan program disesuaikan dengan jam aktivitas penerima manfaat sehingga makanan dapat diterima dalam kondisi layak konsumsi dan tepat waktu.

> Persiapan datangnya jam 4 sore, bahan makanan juga datangnya jam 4 sore lalu dibersihkan dan dikupas oleh tim persiapan, kalau menu ayam itu biasanya dibersihkan pada malam hari biar tidak busuk dan datangnya ayam juga malam. Tim pengolahan jam 12 malam, tim pemorsian jam 3 dini hari, dstribusi jam 06.30 WIB drivernya datang.[57]

Dalam wawancara kedua tersebut tidak memiliki perbedaan dengan wawancara sebelumnya, yang mana implementasi penyaluran terstruktur dimulai dari tim persiapan sampai dengan tim pendistribusian. Dalam wawancara tersebut juga menyebutkan bahwa ayam datangnya malam dan dibersihkan pada malam hari juga agar pagi masih layak konsumsi, hal ini menunjukkan bahwa dalam implementasi penyaluran pihak SPPG tetap fokus memperhatikan kelayakan bahan pangan untuk di distribusikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> Makan bergizi gratis hanya berjalan 5 hari dalam seminggu di sekolah maupun ibu hamil dan ibu menyusui, dulu pernah terlambat karena kekurangan nasi, kan biasanya takarannya pas, nah ini tiba-tiba kurang nasinya, jadi kita panik dan segera masak lagi tapi waktu itu yang terlambat ibu hamil dan ibu menyusui yang di antarkan ke rumah-rumah terlambat sedikit tidak apa-apa, pendistribusian sekarang sekitar 2.700 untuk keseluruhan penerima manfaat termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.[58]

Dalam wawancara tersebut menyebutkan bahwa program dilakukan 5 hari dalam 1 minggu, yang mana jumlah pendistribusian

[57] Nur Habibah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 04 Mei 2026.
[58] Sulastri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mencapai 2.700 porsi untuk semua penerima manfaat. Pernah mengalami keterlambatan kepada ibu hamil dan menyusui dikarenakan kekurangan nasi, jadi dapur cepet-cepet memasak untuk segera di distribusikan. Hal ini menunjukkan bahwa program memiliki skala pelaksanaan yang besar sehingga membutuhkan koordinasi, kesiapan sumber daya, dan manajemen distribusi yang baik. Banyaknya jumlah penerima manfaat mengharuskan setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari persiapan bahan, pengolahan, pemorsian, hingga distribusi, dilakukan secara tepat waktu agar makanan dapat diterima dalam kondisi layak konsumsi.

> Ada jadwal penjadwalan pendistribusian makanan untuk SD jam 7 sampai jam 9, SMP jam 9 sampai jam 10, dulu pernah terlambat karena pemorsian kurang jadi ambil di tim lain, makanya pernah terlambat karna kurang tenaga, distribusi 3.000 lebih sedikit itu ketambahan ibu hamil dan ibu menyusui, yang awalnya 4.000 kurang 100 karena dulu sekolah di luar desa ikut sini tapi sekarang berkurang karena sudah tidak ikut sini.[59]

Dari hasil wawancara kedua tentang penjadwalan pendistribusian ini lebih spesifik dibandingkan dengan hasil wawancara pertama masalah penjadwalan, yang mana kita tahu perlunya penjadwalan yang terstruktur agar pendistribusian tidak mengalami keterlambatan dan bisa segera dikonsumsi supaya tidak basi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pembagian waktu distribusi tersebut pelaksanaan program telah terstruktur dan bisa sampai tepat waktu kepada penerima manfaat. Namun, ada perbedaan pernyataan yang di sampaikan oleh wawancara

[59] Nur Habibah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 04 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pertama dan kedua yaitu masalah keterlambatan dan jumlah pendistribusian. Dalam wawancara pertama menyebutkan bahwa keterlambatan terjadi karena kekurangan nasi namun di wawancara kedua keterlambatan di karenakan kekurangan bantuan tenaga pada tim pemorsian.

Hal ini menunjukkan bahwa keterlambatan pendistribusian tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa hambatan teknis saling berkaitan. Kekurangan tenaga pada tahap pemorsian dapat berdampak pada lambatnya proses pembagian makanan, sedangkan kendala ketersediaan nasi menunjukkan adanya hambatan pada kesiapan produksi makanan. Dengan demikian, kedua pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kendala operasional yang terjadi pada waktu atau kondisi yang berbeda dalam pelaksanaan program.

Selain itu, ditemukan pula perbedaan jumlah pendistribusian makanan. Wawancara pertama menyebutkan jumlah distribusi sekitar 2.700 porsi, sedangkan wawancara kedua menyebutkan lebih dari 3.000 porsi. Hal ini menunjukkan bahwa penerima manfaat bersifat dinamis dan berubah sesuai cakupan pelayanan. Dalam wawancara kedua dijelaskan bahwa jumlah penerima manfaat sempat mendekati 4.000 porsi ketika terdapat sekolah di luar desa yang ikut menerima distribusi makanan, kemudian berkurang setelah sekolah tersebut tidak lagi menjadi bagian dari cakupan pelayanan SPPG Desa Wonoasri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu, adanya tambahan penerima manfaat juga memengaruhi perubahan jumlah distribusi makanan.

> Tim persiapan sudah melakukan penyortiran. Jadi supplier datang disortir memang bagus pisangnya, kuningnya juga bagus, ternyata dalamnya keracunan kita tidak tahu, kita akui itu masalah tim persiapan karna ya namanya manusia gatau, sudah dipilih yang bagus dan jumlahnya tidak sedikit, tim pemorsian juga menyortir kembali tapi kok masih ada yang bilang jelek, ada juga laporan tentang makanan busuk di foto masyarakat dan di makanannya ada telur lalat, yang mana seharusnya segera di makan itu di buat nunggu lama jadi busuk, kan waktu menunya ayam kecap jadi gampang busuk dan juga tidak ada pengawetnya jadi harus segera konsumsi.[60]

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya sudah di lakukan penyortiran berulang, pertama di tim persiapan dan kedua di tim pemorsian. Akan tetapi, karena tidak berani melakukan penyortiran yang berlebihan seperti memencet buah atau melihat dengan cara dikupas yang ditakutkan bisa membuat buah lecet dan tidak bagus dari luarnya, jika hal tersebut dilakukan bisa membuat penilaian masyarakat terhadap dapur menjadi jelek karena pasti masyarakat berfikir bahwa buahnya tidak bagus dari luar dan dalam.

Narasumber juga mengakui bahwa kondisi tersebut menjadi bagian dari kekurangan pada tahap persiapan karena keterbatasan manusia dalam mendeteksi kualitas bagian dalam buah hanya melalui pemeriksaan fisik luar. Terlebih lagi, jumlah bahan makanan yang disiapkan dalam program ini sangat besar sehingga memungkinkan kesalahan tetap terjadi.

[60] Sulastri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selanjutnya permasalah juga muncul adanya makanan basi serta ditemukannya telur lalat pada makanan. Hal ini menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap kualitas makanan yang didistribusikan oleh proram MBG. Narasumber juga menjelaskan bahwa makanan tersebut terbuat dari ayam dan tanpa pengawet sehingga harus segera dikonsumsi. Namun oleh pelapor tidak segera di konsumsi sehingga menyebabkan makanan basi, menunya ayam kecap yang mana ayam kecap ini memang mudah sekali bau dan mengundang hewan yang tidak di inginkan. Jadi Makan Bergizi Gratis (MBG) ini merupakan makanan siap saji yang harus segera konsumsi dan kalau tidak segera di konsumsi menyebabkan mudal mengalami perubahan pada kualitas makanan.

> Kalau misal buah busuk dan lauk basi pasti langsung di ganti, pendistribusian di kasih cadangan buat mengganti jika ada buah busuk atau lauk basi, pernah ada juga kekurangan dalam ompreng tidak ada buahnya jadi cepet-cepet di ganti, kalau misal ada bahan yang kurang itu harus segera mengolah lagi dan belanja lagi, tim permosian harus bisa mencukupkan sesuai dengan porsi hari ini.[61]

Dalam wawancara tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Desa Wonoasri memiliki mekanisme penanganan apabila ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi atau terjadi kekurangan dalam pendistribusian. Narasumber juga menjelaskan bahwa apabila terdapat buah busuk atau lauk basi, maka makanan tersebut akan langsung diganti menggunakan cadangan yang telah disiapkan pada saat pendistribusian. Begitu juga apabila

[61] Nur Habibah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 04 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ompreng belum lengkap maka tim pelaksana segera melakukan penggantian agar makanan tetep sesuai dengan standar porsi yang telah ditentukan.

Hal ini juga dipertegas oleh wali murid dimana buah yang busuk segera diganti dan guru sebagai penanggung jawab pengagantian buah apabila ada yang busuk.

> Jadi nanti anak-anak yang buahnya busuk itu disuruh taruh ke mejanya pak guru, terus sama pak guru nanti diganti. Dan kalu anaknya tidak suka ya dibawa pulang, sama saya kadang dibawain kotak bekal buat membawa pulang makanan yang tidak mau.[62]

Pernyataan wali murid menunjukkan bahwa terdapat mekanisme penanganan apabila makanan yang diterima peserta didik tidak layak dikonsumsi, khususnya buah yang sudah busuk. Dalam kondisi tersebut, peserta didik diarahkan untuk meletakkan buah yang rusak di meja guru agar dapat diganti dengan buah yang masih layak. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi antara pihak sekolah dengan penyelenggara program dalam menjaga kualitas makanan yang diterima oleh peserta didik.

Selain itu, informan menjelaskan bahwa apabila peserta didik tidak menyukai menu yang disediakan, makanan tidak dibuang, melainkan diperbolehkan untuk dibawa pulang. Bahkan, wali murid terkadang membekali anak dengan kotak makan agar sisa makanan dapat dibawa pulang. Temuan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi

[62] Tinah, diwawancari oleh penulis, Jember, 2 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemborosan makanan (*food waste*) sekaligus memberikan fleksibilitas kepada penerima manfaat dalam memanfaatkan makanan yang telah diterima. Hal ini juga dibuktikan dengan pernyataan dari wali murid lain.

> Anaknya itu kadang gasuka, kadang kalua gasuka apa ga habis ya dibiarin diwadah MBG nya, di omprengnya itu, jadi ya bagaimana lagi orag anaknya gasuka, anaknya ini pilih-pilih makanan jadi sering tidak suka.[63]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua peserta didik mengonsumsi makanan yang disediakan dalam Program Makan Bergizi Gratis hingga habis. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah preferensi atau kebiasaan makan peserta didik yang cenderung memilih jenis makanan tertentu (*picky eater*). Akibatnya, apabila menu yang disajikan tidak sesuai dengan selera anak, makanan sering kali tidak dihabiskan dan dibiarkan di dalam wadah makan (ompreng).

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh kelancaran distribusi makanan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat penerimaan peserta didik terhadap menu yang disediakan. Dengan demikian, tujuan program untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik dapat menjadi kurang optimal apabila makanan yang diberikan tidak dikonsumsi.

[63] Tutik, diwawancarai oleh penulis, Jember, 2 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jika dibandingkan dengan hasil wawancara wali murid lainnya, terdapat perbedaan dalam cara menyikapi makanan yang tidak disukai oleh peserta didik. Wali murid sebelumnya menyatakan bahwa makanan yang tidak habis dapat dibawa pulang menggunakan kotak bekal, sedangkan pada pernyataan ini makanan justru ditinggalkan di dalam wadah MBG. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa praktik pemanfaatan makanan oleh penerima manfaat tidak sepenuhnya seragam dan dipengaruhi oleh kebiasaan masing-masing anak maupun orang tua.

Temuan ini juga menjadi masukan bahwa dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis perlu adanya edukasi kepada peserta didik mengenai pentingnya mengonsumsi makanan bergizi serta evaluasi terhadap variasi menu agar lebih sesuai dengan karakteristik dan preferensi peserta didik, tanpa mengurangi standar gizi yang telah ditetapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berbeda lagi dengan wali murid satunya yang anaknya tidak pilih-plih soal makanan yang apapun dimakan, Dimana wali murid satunya mengaku bahwa anaknya sering menghabiskan MBG nya dikarenakan enak atau bahkan dia merasa lapar.

> Kalo anaknya enak ga enak kadang dimakan kalua merasa lapar, jadi selalu habis meskipun nyisa itu tidak banyak, tetapi lebih sering habis yak arna anaknya mau, pernah menunya pecel sama anaknya dimakan aja dan habis, jadi belum tentu banyak yang suka belum tentu juga banyak yang tidak suka, tergantung anaknya mau makan apa tidak gitu.[64]

[64] Winarsih, diwawancarai oleh penulis, Jember, 2 Juli 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berbeda dengan pernyataan wali murid sebelumnya yang menyampaikan bahwa anaknya sering tidak menghabiskan makanan karena cenderung memilih jenis makanan tertentu, informan ini menjelaskan bahwa anaknya tetap mengonsumsi makanan yang disediakan meskipun menu tersebut belum tentu sesuai dengan seleranya. Menurut informan, makanan umumnya tetap dihabiskan, atau apabila masih tersisa jumlahnya relatif sedikit. Bahkan, menu seperti pecel yang belum tentu disukai oleh sebagian anak tetap dikonsumsi hingga habis oleh anaknya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerimaan terhadap menu Program Makan Bergizi Gratis berbeda-beda pada setiap peserta didik. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan makan, preferensi individu, serta kemauan anak untuk mengonsumsi makanan yang telah disediakan. Dengan demikian, tidak semua peserta didik memberikan respons yang sama terhadap menu yang disajikan.

Perbedaan pandangan antara kedua wali murid tersebut menunjukkan adanya variasi pengalaman penerima manfaat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Di satu sisi, terdapat peserta didik yang tidak menghabiskan makanan karena bersifat selektif terhadap menu, sedangkan di sisi lain terdapat peserta didik yang tetap menghabiskan makanan meskipun menu yang disajikan bukan makanan favoritnya. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

program dalam memenuhi kebutuhan gizi peserta didik tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas dan variasi menu, tetapi juga oleh karakteristik dan kebiasaan makan masing-masing peserta didik.

Apabila dikaitkan dengan konsep implementasi kebijakan, temuan ini menunjukkan bahwa respons penerima manfaat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Meskipun pelaksana telah menyediakan makanan sesuai dengan standar yang ditetapkan, tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuan pemenuhan gizi tetap dipengaruhi oleh sejauh mana makanan tersebut diterima dan dikonsumsi oleh peserta didik. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis perlu mempertimbangkan aspek penerimaan peserta didik sebagai bagian dari penilaian keberhasilan implementasi kebijakan.

Ditemukan juga kekurangan bahan makanan, maka tim pelaksana segera melakukan pengolahan ulang dan membeli kembali bahan yang kurang. Tim pemorsian juga harus bisa menyesuaikan dengan keperluan porsi hari ini agar tidak kekurangan bahan makanan.

Pernyataan narasumber ini memperkuat pernyataan narasumber di awal, yang mana narasumber pertama menyampaikan bahwa masih ada buah busuk dan lauk basi. Namun di pertegas oleh narasumber kedua bahwa buah busuk dan ayam basi itu sudah bisa di atasi dan sudah dilakukan evaluasi, sehingga sekarang tidak ada komplain mengenai hal tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> Ramadan kemarin pembagian makanan bukan ompreng melainkan makanan ringan dan tidak di *double* seperti waktu liburan semester kemarin, waktu ramadan hari ini ya hari ini, dan kalau ramadan pendistribusian berangkat jam 8.[65]

Berdasarkan hasil wawancara menujukkan bahwa SPPG melakukan perbaikan dengan merubah kebijakan yang awalnya pada masa liburan semester itu di *double* 1 minggu 1 kali dikarenakan makanan ringan jadi bisa dikonsumsi kapan saja, namun masyarakat banyak yang tidak terima dan juga membuat bingung pada perhitungan gizi yang seharusnya di dapat, kini pada saat ramadan distribusi makanan ringan hari ini ya dapat hari ini, dengan begini membuat jelas perhitungan gizinya.

Namun, hal ini menujukkan juga bahwa pelaksanaan program bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan penerima manfaat. Distribusi di lakukan pada jam 08.00 WIB agar sesuai dengan kondisi selama bulan puasa. Denagn demikian, penyelenggara program tetap tidak hanya menjalankan prosedur secara tetap, tetapi juga melakukan adaptasi terhadap kondisi sosial dan kebiasaan masyarakat.

> Penyaluran waktu ramadan itu beda lagi karena tiap sebulan sekali kebijakan baru, jadi setiap bulan kebijakannya bergantian, pas ramadan ga di rangkep kayak liburan semester tahun lalu, biar sesuai dengan anggaran dan perhitungan gizinya per hari, sebenarnya menunya ganti-ganti dan rasanya tidak sehambar itu karena memakai sedikit penyedap rasa.[66]

[65] Sulastri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.
[66] Nur Habibah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 04 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan program tidak bersifat tetap, melainkan mengikuti arahan dan penyesuaian kebijakan dari pihak terkait. Penyesuaian tersebut berkaitan dengan efisiensi anggaran sekaligus upaya menjaga standar gizi agar tetap sesuai dengan ketentuan program. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak monoton dan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi.

> Misal ada anak-anak gasuka itu bilang ke dapur, jadi dapur langsung mengganti menu biar anak-anak bisa suka, dapur langsung evaluasi dan makanan ini gaada micin cuman garam aja jadi harus cepet langsung konsumsi biar gaada kejadian yang tidak diinginkan.[67]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa ternyata dapur menerima komplain masalah anak-anak yang tidak suka dengan menu yang disediakan, dan pihak dapur langsung mengevaluasi dengan mengganti menu baru yang mana bisa di sukai anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa proram tidak bersifat kaku, melainkan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan agar tujuan pemenuhan gizi dapat tercapai secara optimal. Sebab, keberhasilan program tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan, tetapi juga dari makanan yang benar-benar dikonsumsi oleh penerima manfaat.

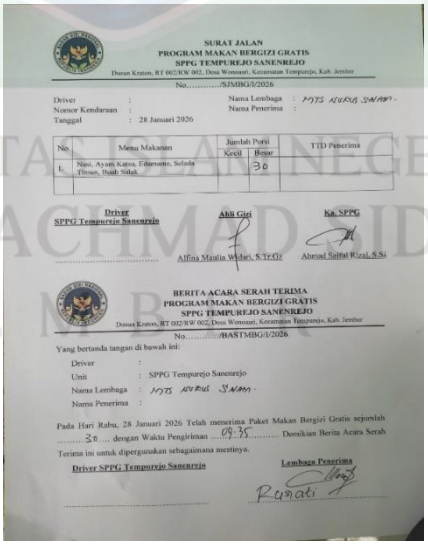
> Banyak anak-anak yang tidak suka dan ada yang dibawa pulang karena biasanya anak kelas 1 yang makan masih di suapin, jadi kadang di bawa pulang.[68]

[67] Sulastri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.
[68] Nur Habibah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 04 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara tersebut menujukkan bahwa kebanyakan yang di bawa pulang adalah anak yang tidak bisa makan sendiri atau masih di suapin oleh orang tuanya, jadi dibawa pulang agar bisa dimakan di rumah. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya dipengaruhi oleh kelancaran distribusi makanan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor usia, kebiasaan makan anak, dan tingkat kesukaan terhadap menu yang diberikan. Anak-anak usia dini cenderung lebih memilih makanan tertentu dan belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan variasi menu yang disediakan dalam program. Akibatnya, terdapat makanan yang tidak langsung dikonsumsi dan justru dibawa pulang oleh penerima manfaat.

Gambar 4.2 Surat Jalan dan Berita Acara Serah Terima SPPG Desa Wonoasri



SURAT JALAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
SPPG TEMPUREJO SANENREJO
Dusun Kraton, RT 002/RW 002, Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kab. Jember

No...../SJMBG/I/2026

Driver :
Nomor Kendaraan :
Tanggal : 28 Januari 2026

Nama Lembaga : MTS NURUL IMAN
Nama Penerima :

No.	Menu Makanan	Jumlah Porsi Kecil	Jumlah Porsi Besar	TTD Penerima
1.	Nasi, Ayam Katsu, Edamame, Selada Timun, Buah Melon		30	

Driver SPPG Tempurejo Sanenrejo | Ahli Gizi | Ka. SPPG

Alfina Maulia Widari, S.Tr.Ot | Ahmad Saiful Rizal, S.Si

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
SPPG TEMPUREJO SANENREJO
Dusun Kraton, RT 002/RW 002, Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kab. Jember

No...../BASTMBG/I/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Driver :
Unit : SPPG Tempurejo Sanenrejo
Nama Lembaga : MTS NURUL IMAN
Nama Penerima :

Pada Hari Rabu, 28 Januari 2026 Telah menerima Paket Makan Bergizi Gratis sejumlah 30 dengan Waktu Pengiriman 09.35 Demikian Berita Acara Serah Terima ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Driver SPPG Tempurejo Sanenrejo | Lembaga Penerima

Rusnati

Sumber: Dokumentasi pribadi penulis, 28 Januari 2026.

Gambar tersebut menunjukkan dokumen resmi berupa Surat Jalan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam pelaksanaan Program

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MBG oleh SPPG Desa Wonoasri, Kabupaten Jember. Dokumen ini terdiri dari 2 bagian utama:

1. Surat Jalan

   Bagian atas merupakan surat jalan yang berfungsi sebagai bukti pengiriman makanan dari pihak SPPG kepada lembaga penerima. Informasi yang tercantum meliputi:

   - Identitas program dan lokasi SPPG
   - Tanggal distribusi (28 Januari 2026)
   - Nama lembaga dan penerima
   - Menu makanan (nasi, ayam katsu, edamame, sayur, buah salak)
   - Jumlah porsi tercatat 30 porsi

2. Berita Acara Serah Terima (BAST)

   Bagian bawah merupakan bukti bahwa makanan telah diterima oleh pihak penerima, yang berisi:

   - Identitas pihak pengirim dan penerima
   - Jumlah paket yang diteriman(30 porsi)
   - Waktu pengiriman (sekitar pukul 09.00 WIB)
   - Tanda tangan kedua belah pihak sebagai bukti sah serah terima

Temuan dokumen tersebut selanjutnya diperjelas melalui hasil wawancara dengan penerima manfaat.

> Ini dokumen yang selalu di dapat waktu pendistribusian oleh pihak SPPG kepada kami, jadi nanti setelah tanda tangan maka makanan bisa turun dan bisa di bagikan kepada siswa waktu makan siang atau waktu istirahat.[69]

[69] Farhan Saputra, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dokumen ini berasal dari wawancara kepada penerima manfaat yaitu MTs Nurus salam. Adanya dokumen ini menunjukkan bahwa distribusi dilakukan dengan prosedur yang sudah distandarisasi. Ini mencerminkan bahwa program MBG tidak berjalan secara informal, melainkan mengikuti sistem administrasi yang jelas. Surat jalan dan berita acara serah terima digunakan oleh SPPG pada tahap pendistribusian untuk memastikan bahwa proses penyaluran Program Makan Bergizi Gratis berjalan tertib, terkontrol, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun operasional.

Secara lebih rinci, fungsi surat jalan yaitu sebagai dokumen pengantar distribusi makanan yang memuat informasi mengenai jenis makanan, jumlah porsi, tujuan distribusi, waktu pengiriman, serta pihak pengirim dan penerima. Surat jalan digunakan untuk memastikan bahwa makanan yang didistribusikan telah sesuai dengan data penyaluran dan benar-benar dikirim ke lokasi penerima manfaat.

Sedangkan berita acara serah terima digunakan sebagai bukti resmi bahwa makanan telah diterima oleh pihak sekolah atau penerima manfaat dalam kondisi dan jumlah yang sesuai. Dokumen ini biasanya disertai tanda tangan pihak SPPG dan pihak penerima sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 4.3 Gambaran menu perbedaan porsi kecil dan porsi besar di SPPG Wonoasri



Sumber: Dokumentasi akun TikTok resmi SPPG, diakses pada 16 Juni 2026.

Gambar tersebut merupakan publikasi *"Today's Menu"* dari SPPG Desa Wonoasri tanggal 18 Maret 2026, yang menunjukkan pembagian menu MBG khusus selama bulan Ramadan. Dalam gambar terlihat porsi kecil (1515 porsi) dan porsi besar (1171 porsi).

Menu berupa makanan ringan yaitu porsi kecil roti, susu, salak, dan porsi besar roti, susu, salak, kacang kedelai. Informasi kandungan per gizi per porsi meliputi:

- Energi (kkal)
- Protein
- Lemak
- Karbohidrat (KH)
- Serat

Gambar di atas menunjukkan proses pelaksanaan kegiatan, yang kemudian diperkuat dengan hasil wawancara berikut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> Jadi sebenarnya 1 ompreng itu bukan 15.000, begini pembagiannya 15.000 itu 2.000 diberikan kepada penyedia tempat atau tanah yang dibanguni, lalu 3.000 digunakan untuk operasional dapur, dan 10.000 untuk porsi besar serta 8.000 untuk porsi kecil. Masyarakat sering salah menilai 15.000 per ompreng padahal itu buat keseluruhan dapur.[70]

Menurut narasumber dalam wawancara di atas, bahwa 15.000 ini untuk keseluruhan dapur yang artinya 1 ompreng bukan 15.000, jadi sebenarnya Makan Bergizi program dari pemerintah ini bukan hanya berfokus pada penyediaan makanan saja tetapi juga memikirkan bagaimana operasional MBG tetap berjalan sesuai dengan aturan dan perhitungan gizi yang harus di dapat. Karena di dalam operasional dapur banyak tenaga pekerja yang memerlukan gaji serta dapur juga perlu kebutuhan lain seperti air, listrik, peralatan masak dan lain-lain.

> Jadi MBG ini tidak 15.000, biasanya pembagiannya 10.000 porsi besar di peruntukkan untuk SMP an SMA, nah porsi kecil yang 8.000 ini untuk TK – SD kelas 1 & 2, karena pertimbangan menu ini juga mmepertimbangkan perhitungan gozonya, agar sesuai dengan usia yang harus di dapat.[71]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Narasumber kedua juga memepertegas bahwa 15.000 ini untuk keseluruhan dapur karena dapur juga butuh tetap beroperasional menggunakan dana yang mana agar program tetap berjalan sesuai dengan aturan. Selain itu, porsi besar dan kecil ini sudah dipertimbangkan akan didistribusikan kepada yang sesuai dengan perhitungan gizi, yang artinya tidak semua perhitungan gizinya sama

[70] Sulastri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.
[71] Nur Habibah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 04 Mei 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pasti mempertimbangkan usia dan perhitungan gizi yang harus di dapat.

Seperti contoh pada gambar di atas, dimana gambar tersebut menerangkan perbedaan porsi kecil dan porsi besar waktu bulan ramadan. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan gizi tidak boleh di samakan, karena beda usia beda perhitungan gizi yang harus di dapat.

Gambar tersebut menunjukkan bahwa program MBG bersifat adaptif terhadap kondisi sosial keagamaan, khususnya bulan ramadan. Menu yang diberikan berupa makanan ringan, berbeda dengan hari biasa yang umunya berupa makanan berat. Hal ini disesuaikan dengan pola konsumsi saat puasa dan kebutuhan berbuka. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program tidak kaku, tetapi fleksibel mengikuti kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik benang merah bahwa implementasi penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Desa Wonoasri telak dilaksanakan melalui sistem kerja yang terstruktur, berjenjang, dan berkelanjutan mulai dari tahap persiapan bahan, pengolahan, pemorsian hingga pendistribusian kepada penerima manfaat. Seluruh tahapan dilakukan berdasarkan pembagian tugas yang jelas dan jadwal yang telah ditentukan agar makanan dapat diterima tepat waktu serta tetap dalam kondisi layak konsumsi. Selain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

itu, adanya dokumen administratif seperti surat jalan, berita acara serah terima, dan checklist uji organoleptik meunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak berjalan secara informal, melainkan telah menerapkan sistem administrasi, pengawasan mutu, dan standar keamanan pangan dalam proses distribusinya.

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala operasional, seperti keterlambatan distibusi akibat kekurangan bahan makanan dan tenaga pemorsian, adanya buah busuk dan lauk basi. Kendala tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dalam skala besar memerlukan kesiapan sumber daya manusia, ketepatan manajemen distribusi, serta pengawasan kualitas pangan yang lebih optimal. Meskipun demikian, pihak SPPG Desa Wonoasri menunjukkan adanya upaya evaluasi dan penanganan secara cepat terhadap setiap permasalahan yang muncul, seperti menyediakan cadangan makanan, melakukan penggantian menu, hingga menyesuaikan pola distribusi berdasarkan kondisi tertentu seperti bulan ramadan.

Dengan demikian, pola utama yang dapat ditemukan dalam implementasi penyaluran Program MBG di SPPG Desa Wonoasri adalah adanya keseimbangan antara sistem pelaksanaan yang terstruktur dengan kemampuan adaptasi terhadap kondisi di lapangan. Program tidak hanya berorientasi pada tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga memperharikan kualitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

makanan, ketepatan waktu distribusi, kebutuhan gizi, serta respons terhadap keluhan masyarakat. Oleh karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program MBG tidak hanya ditentukan oleh prosedur administratif dan distribusi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh koordinasi antar tim, pengawasan kualitas pangan, kesiapan sumber daya, serta kemampuan penyelenggara program dalam melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan sesuai kondisi masyarakat dan penerima manfaat.

b. Bentuk Pengawasan Terhadap Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Desa Wonoasri Kabupaten Jember

Dalam Implementasi Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis tentu tidak lepas dari pengawasan pada setiap proses kegiatan dan tahapan implementasi penyaluran, dari segi internal maupun eksternal sudah pasti perlu adanya pengawasan agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut penjelasan pengawasan menurut hasil wawancara kepada staf SPPG Desa Wonoasri dan penerima manfaat yaitu MTs Nurussalam Wonoasri Tempurejo Jember.

> Yang bertugas mengawasi di dapur itu ada Kepala Dapur, Ahli Gizi, dan Akuntan biasanya masalah keuangan serta memantau ketika bahan datang. Jadi nanti ahli gizi datang pada jam 03.30 pagi mengawasi dan melakukan pengecekan kepada masakan, melihat apakah makanan sudah matang apa tidak, ahli gizi juga meakukan pengecekan ketika proses penyortiran oleh tim persiapan untuk membantu melihat timbangan setiap bahan yang di gunakan seperti timbangan buah. Selain itu, di dapur juga diawasi oleh CCTV negara yang menyambung langsung kepada BGN pusat, sehingga harus bener-bener kerja, menggunakan APD

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> lengkap, bermasker, pakai sarung tangan, jadi semua harus higienis, masker miring sedikit aja satpam langsung masuk menegur "seng bener lak gae masker" (yang bener kalau pakai masker), dan juga pengawasan ketat dilakukan oleh Kepala Dapur, Ahli Gizi, dan Akuntan, selain Kepala Dapur, Ahli Gizi, dan Akuntan pengawasan juga dilakukan oleh pihak luar yaitu Puskesmas setempat setiap 1 bulan sekali bahkan ga sampai 1 bulan sudah kesini lagi untuk melakukan pengecekan dapur seperti air, kebersihan, pokok dapur itu harus bener-bener bersih tidak boleh kotor sama sekali agar sesuai standar kesehatan. Saya tau dalamnya kalau mereka (Kepala Dapur, Ahli Gizi dan Akuntan) kan cuman mengawasi dapur.[72]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa SPPG tidak hanya ada pengawasan internal saja tetepi juga pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Dapur, Ahli Gizi, dan Akuntan yang memiliki tugas dan fungsi berbeda namun saling berkaitan dalam menjaga kualitas pelaksanaan program. Kepala Dapur berperan mengawasi jalannya proses produksi makanan agar sesuai prosedur operasional, Ahli Gizi bertugas memastikan kualitas gizi, kematangan makanan, serta ketetapan takaran bahan makanan yang digunakan, sedangkan Akuntan melakukan pengawasan terhadap aspek keuangan dan pencatatan bahan datang. Pengawasan internal tersebut menujukkan adanya struktur kerja yang terorganisasi, dimana setiap pihak memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam sistem organisasi.

Selain itu, Ahli Gizi juga melakukan pengawasan sejak pukul 03.30 pagi yang menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi dimulai sejak proses persiapan bahan,

[72] Sulastri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengolahan, hingga pemorsian makanan. Hal ini memperlihatkan adanya pengawasan *preventif* untuk meminimalisir kesalahan dalam proses produksi makanan. Pengawasan terhadap timbangan bahan makanan seperti buah juga menunjukkan adanya upaya menjaga kesesuaian standar porsi dan kandungan gizi bagi penerima manfaat program MBG.

Pengawasan tidak hanya oleh petugas internal terdapat pula pengawasan berbasis teknologi melalui CCTV yang terhubung langsung dengan Badan Gizi Nasional pusat. Sistem ini menunjukkan bahwa adanya pengawsan secara *real time* dari pemerintah pusat terhadap aktivitas di dapur. Penggunaan CCTV ini mendorong pekerja untuk disiplin menggunakan APD lengkap demi menjaga higienitas makanan. Bahkan pengawasan ketat terhadap kesalahan kecil seperti masker miring saja petugas keamanan langsung masuk menegur.

Bukan hanya pengawasan internal tetapi juga ada pengawasan eksternal yang mana dilakukan oleh Puskesmas setempat biasanya 1 bulan sekali bahkan bisa saja belum 1 bulan sudah datang lagi. Hal ini menunjukkan bahwa seringnya pengecekan terhadap kebersihan dapur dan kadar air yang dilakukan oleh Puskemas setempat membuat program ini menjadi lebih higienis dan terjaga keamanan pangan agar sesuai dengan aturan yang bertujuan untuk menjaga kualitas makanan. Pemeriksaan ini juga menunjukkan tingginya perhatian terhadap standar kesehatan dalam penyelenggaraan program MBG.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> Pengawasan langsung dari BGN dan disini ada CCTV negara langsung jadi diawasi langsung melalui CCTV, kalau di dalamnya yang mengawasi langsung Kepala Dapur, Ahli Gizi, sama Akuntan. Waktu pendistribusian juga ada yang mengawasi membantu Kepala Dapur yaitu Asisten Lapangan, asisten lapangan ini yang mengawasi proses pendistribusian dan apabila ada keluhan bisa juga kepada asisten lapangan untuk dilaporkan kepada Kepala Dapur. Kalau pengecekan dari luar ada puskesmas yang datang, kayak setiap bulan pasti ada pengecekan dapur, kemarin juga disini sudah melakukan pengecekan sertifikat halal, setiap 1 bulan itu ada pengecekan jadi dapur harus bersih ga boleh kotor, jadi ompreng yang sudah bersih harus di sterilkan lagi, staf itu ga boleh makan di dalam dan ga boleh makan dari situ harus bawa makanan sendiri dari rumah, jadi di dalam harus steril dan bersih.[73]

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Kepala Dapur, Ahli Gizi, dan Akuntan benar-benar mengawasi terhadap aktivitas dapur. Selain itu pada tahap pendistribusian makanan terdapar asisten lapangan yang memabantu Kepala Dapur dalam mengawasi proses distribusi kepada penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak berhenti pada tahap produksi makanan saja, tetapi juga mencakup tahap distribusi agar pelaksanaan program berjalan tertib dan sesuai prosedur.

Dalam hal ini pernyataan narasumber kedua memperkuat pernyataan narasumber pertama yang mana pengawasan berhenti pada tahap pemorsian tetapi ternyata pendistribusian pun ada pengawasan sendiri. Apabila terdapat keluhan dari sekolah atau siswa terkait makanan yang diterima, maka bisa melakukan pelaporan langsung kepada Asisten Lapangan untuk bisa disampaikan kepada Kepala

[73] Nur Habibah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 04 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dapur. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG memiliki mekanisme pengawasan sekaligus evaluasi dalam implementasi penyaluran program MBG.

> Jika apabila ada karyawan yang melanggar pasti ada sanksi secara lisan dulu terus ketiganya pemecatan, tapi alhamdulillah disini karyawannya gaada yang melanggar, jadi alhamdulillah belum ada yang kena sanksi.[74]

Dari penjelasan narasumber tersebut menunjukkan bahwa adanya sanksi jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh staf, serta sanksi yang diberikan secara bertahap dimulai dari sanksi lisan hingga tindakan pemecatan apabila pelanggaran dianggap berat atau dilakukan secara berulang. Sistem ini menunjukkan adanya pengendalian perilaku kerja agar seluruh karyawan tetap mematuhi aturan dan standar operasional yang telah diteatpkan dalam pengelolaan dapur MBG.

> Jika ada yang melanggar pasti kena sanksi lisan sampai pemecatan tapi disini tidak ada karna gaada yang melanggar.[75]

Pernyataan narasumber tersebut tidak berbeda jauh dengan yang disampaikan narasumber pertama. Bahwa SPPG memiliki kedisiplinan dalam hal standar kerja dan aturan yang memang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai prosedur.

> Jadi sebelum SPPG operasional kita itu ada *training* 3 bulan praktek dan memberitahu tentang aturan tertulis, jadi harus sesuai dengan yang di suruh negara, besok sabtu ini datang dari halal-halal itu buat ngecek itu.[76]

[74] Sulastri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.
[75] Nur Habibah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 04 Mei 2026.
[76] Sulastri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam wawancara tersebut menjelaskan bahwa sebelum SPPG beroperasi, seluruh staf yang akan bekerja disitu akan melakukan *training* atau uji coba selama 3 bulan secara praktek dan harus sesuai dengan aturan tertulis, yang artinya praktek dan aturan harus bisa seimbang agar program berjalan lancar. Pembinaan sumber daya manusia ini dilakukan agar seluruh pekerja memahami standar kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, adanya pengecekan halal-halal dari kunjungan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan bahwa pengawasan eksternal terhadap program juga berjalan.

> Sebelum operasional ada *training* 3 bulan dan ikut sosialisasi 1 hari tidak pulang, kayak ospek itu wes, yang datang BGN dari pusat, kemarin juga disini baru pengecekan BPOM halal-halal itu.[77]

Pernyataan dari narasumber di atas menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pelaksanaan program MBG, tetapi juga mempersiapkan sumber daya manusia terlebih dahulu agar memenuhi tugas, aturan, dan standar kerja yang harus ditetapkan dalam pelaksanaan program. Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan tersebut bertujuan memastikan bahwa akanan yang diproduksi emenuhi standar keamanan, kebersihan, serta ketentuan kehalalan sebelum diberikan kepada penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program tidak hanya berorientasi

[77] Nur Habibah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 04 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada distribusi makanan, tetapi juga memperhatikan perlinndungan kesehatan dan keamanan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam implementasi penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Desa Wonoasri telak dilaksanakan menyeluruh melalui pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Dapur, Ahli Gizi, Akuntan, serta Asisten Lapangan yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam mengawasi proses produksi, kualitas gizi, kebersihan dapur, pencatatan bahan dan keuangan, hingga proses pendistribusian makanan kepada penerima manfaat. Pengawasan ini menunjukkan adanya sistem kerja yang terstruktur dan pembagian tanggung jawab yang jelas dalam menjaga kualitas pelaksanaan program MBG.

Selain pengawasan langsung oleh petugas internal, pelaksanaan program juga didukung dengan pengawasan berbasis teknologi melalui CCTV yang terhubung langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pusat. Sistem pengawasan ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan kontrol secara *real time* terhadap aktivitas di dapur sehingga seluruh pekerja dituntut untuk disiplin menjalankan standar operasional, terutama terkait kebersihan dan penggunaan alat pelindung diri (APD). Pengawasan yang ketat bahkan terhadap hal-hal kecil seperti pengunaan masker menunjukkan bahwa aspek higienitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan keamanan pangan menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan program MBG.

Di sisi lain, pengawasan eksternal dilakukan oleh Puskesmas setempat melalui pemeriksaan rutin terhadap kondisi dapur, kebersihan, kualitas air, hingga standar kesehatan dan sertifikat halal. Pengawasan eksternal tersebut memperlihatkan adanya keterlibatan lembaga lain dalam memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, adanya mekanisme penyampaian keluhan melalui Asisten Lapangan juga menunjukkan bahwa program memiliki sistem evaluasi dan pengendalian yang terus berjalan selama proses implementasi.

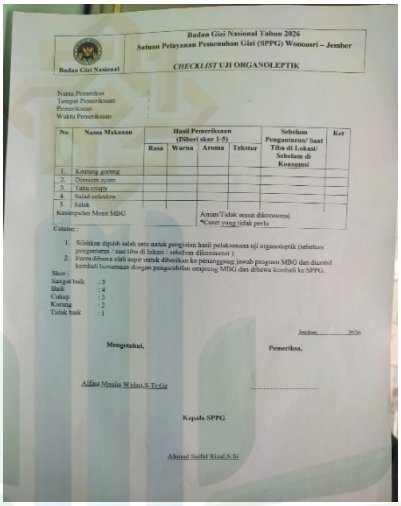
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat program berjalan, tetapi dimulai sejak tahap persiapan sumber daya sebelum operasional, seluruh staf diwajibkan mengikuti *training* selama 3 bulan dan sosialisasi 1 hari penuh yang diberikan langsung oleh pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membentuk tenaga kerja yang memahami aturan, prosedur, dan standar kerja sebelum terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Selain itu, adanya penerapan sanksi bertahap mulai dari teguran lisan hingga pemecatan menunjukkan bahwa SPPG Desa Wonoasri menerapkan sistem disiplin kerja untuk menjaga kepatuhan seluruh staf terhadap aturan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berlaku. Selain itu, terdapat kunjungan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan menunjukkan bahwa program berjalan secara nyata dan bisa dikatakan aman serta memenuhi standar keamanan pangan.

Gambar 4.4 Dokumen Uji Organoleptik dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Desa Wonoasri



Badan Gizi Nasional Tahun 2026
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonoasri – Jember

Badan Gizi Nasional

CHECKLIST UJI ORGANOLEPTIK

Nama Pemeriksa :
Tempat Pemeriksaan :
Pemeriksaan :
Waktu Pemeriksaan :

No	Nama Makanan	Hasil Pemeriksaan (Diberi skor 1-5)				Sebelum Pengantaran/ Saat Tiba di Lokasi/ Sebelum di Konsumsi	Ket
		Rasa	Warna	Aroma	Tekstur		
1.	Kentang goreng						
2.	Dimsum ayam						
3.	Tahu crispy						
4.	Salad coleslow						
5.	Salak						

Kesimpulan Menu MBG : Aman/Tidak aman dikonsumsi
*Coret yang tidak perlu

Catatan :
1. Silahkan dipilih salah satu untuk pengisian hasil pelaksanaan uji organoleptik (sebelum pengantaran / saat tiba di lokasi / sebelum dikonsumsi)
2. Form dibawa oleh supir untuk diberikan ke penanggung jawab program MBG dan diarsipkan kembali bersamaan dengan pengembalian ompreng MBG dan dibawa kembali ke SPPG.

Skor :
Sangat baik : 5
Baik : 4
Cukup : 3
Kurang : 2
Tidak baik : 1

Jember, ... 2026

Mengetahui,

Pemeriksa,

Alfina Maulia Wahni S.Tr.Gz

.....

Kepala SPPG

Ahmad Saiful Rizal S.Si

Sumber: Dokumentasi pribadi penulis, 28 Januari 2026.

Dokumen pada gambar tersebut merupakan Checklist Uji Organoleptik yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional untuk SPPG Wonoasri – Jember tahun 2026. Uji Organoleptik adalah metode penilaian kualitas makanan menggunakan indera manusia, meliputi:

- Rasa
- Warna
- Aroma
- Tekstur

Dalam dokumen tersebut, terdapat identitas pemeriksa dan waktu pemeriksaan, daftar menu makanan (misalnya kentang goreng, dimsum ayam, tahu krispi, salad coleslow, dan salak), kolom penilaian dengan skor 1-5 merupakan kolom kondisi makanan (sebelum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengantaran atau saat tiba atau sebelum dikonsumsi), kesimpulan akhirnya adalam aman atau tidak aman dikonsumsi.

Checklist Uji Organoleptik merupakan instrumen penting dalam menjamin kualitas dan keamanan makanan dalam program MBG. Dokumen ini berfungsi sebagai alat pengendalian mutu, pengawasan, serta bukti administratif dalam proses distribusi makanan. Hal ini menunjukkan bahwa selain menguji keamanan makanan serta jaminan kualitas. Dokumen ini juga bisa untuk menilai anak-anak banyak yang suka terhadap menu baru ini atau tidak. Gambar dokumen tersebut selanjutnya juga diperjelas melalui hasil wawancara dengan pihak terkait.

> Biasanya dokumen ini digunakan oleh pihak dapur ketika terdapat menu baru, jadi ketika ada menu baru sekolah akan diberikan percobaan makanan dan dokumen seperti ini untuk menilai bagaimana perkembangan menu baru. Nanti jika penilaiannya bagus maka menu ini dapat didistribusikan. Dan jika menu tidak enak atau penilaian jelek maka menu langsung di hapus. Jadi nanti biasanya dokumen ini di ambil waktu pihak SPPG kembali mengambil ompreng sekaligus mengambil dokumen penilaian ini.[78]

Dari hasil wawancara tersebut sekaligus bukti dokumen uji organoleptik menunjukkan bahwa SPPG tidak semena-mena dalam membuat menu baru dan tentu saja tetap memepertimbangkan keputusan dari penerima manfaat melalui penilaian menggunakan dokumen uji organoleptik.

[78] Farhan Saputra, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Pembahasan Temuan

a. Implementasi Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Desa Wonoasri Kabupaten Jember

Implementasi Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Desa Wonoasri telah dilaksanakan melalui sistem kerja yang terstruktur, berjenjang, dan berkelanjutan mulai dari tahap persiapan bahan, pengolahan, pemorsian hingga pendistribusian kepada penerima manfaat. Seluruh tahapan dilakukan berdasarkan pembagian tugas yang jelas dan jadwal yang telah ditentukan agar makanan dapat diterima tepat waktu serta tetap dalam kondisi layak konsumsi dan penyaluran di lakukan selama 5 hari dam 1 minggu yaitu mulai dari hari senin-jum'at. Selain itu, adanya dokumen administratif seperti surat jalan dan berita acara serah terima menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak berjalan secara informal, melainkan telah menerapkan sistem administrasi, pengawasan mutu, dan standar keamanan pangan dalam proses distribusinya. Selain itu, terdapat gambar perbedaan antara menu porsi kecil dan porsi besar, yang artinya pihak SPPG mempertimbangkan kecukupan gizi yang seharusnya didapat sessuai dengan usia penerima manfaat.

Tahapan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis ini sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis yang menyebutkan bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"mekanisme penyiapan dan penyaluran MBG di tingkat SPPG mengikuti alur yang di mulai dari tahap *food preparation* sampai dengan pendistribusian makanan kepada penerima manfaat".[79] Hal ini menunjukkan adanya pembagian tugas pada tahapan penyaluran Program MBG ini sudah sesuai dengan aturan dan tidak di lakukan semena-mena, dan apabila harus ada perubahan jadwal maka dapat di sesuaikan dengan kondisi seperti ketika menu sulit maka tim persiapan berangkat lebih awal dan menu ayam harus dibersihkan malam hari agar pagi masih *fresh* dan layak konsumsi.

Pada tahap pendistribusian memiliki penjadwalan agar program bisa sampai tepat waktu kepada penerima manfaat. Pendistribusian untuk TK-SD jam 7 sampai jam 9, untuk SMP jam 9 sampai 10. Hal ini juga menunjukkan kesesuaian dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis yang menyebutkan "jam 08.00 pengantaran untuk Anak Balita, PAUD, TK/RA, SD kelas 1 sd kelas 3. Jam 10 pengantaran untuk SD kelas 4 sd 6, SMP, SMA, ibu hamil dan menyusui".[80] Selain penjadwalan pendistribusian, program juga berjalan selama 5 hari dalam 1 minggu, hal ini sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis yang menyebutkan "MBG disiapkan dan diolah setiap hari yaitu dari senin-jum'at (setiap hari untuk siswa, ibu hami, ibu menyusui, dan

[79] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 35.
[80] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 40.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anak balita)".[81] Dalam hal ini menunjukkan bahwa program terus berjalan selama hari tertentu dan sudah terstruktur sesuai dengan aturan serta para pekerja tetap punya waktu untuk beristirahat selama 2 hari dalam 1 minggu, yang sebelumnya mereka harus bekerja 24 jam untu menyiapkan makanan untuk gizi anak bangsa.

Waktu ramadan implementasi penyaluran Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan dan disesuaikan dengan harinya, jadi semisal hari ini ya dapat hari ini, hal ini disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis yang menyebutkan "khusus pada bulan puasa penerima manfaat diberikan menu khusus berupa makanan yang tidak mudah basi (kering), diberikan pada jam menjelang pulang sekolah".[82] Untuk itu waktu puasa ramadan pendistribusian berangkat pada pukul 08.00. Berbeda ketika pada musim liburan semseter tahun lalu yang penyalurannya dirangkap 1 minggu 1 kali. Pihak SPPG belajar dari implementasi penyaluran pada saat liburan sehingga waktu ramadan tetap dapat per hari. Hal ini juga memudahkan pihak SPPG apalagi Ahli Gizi dalam perhitungan gizi per anak serta mengoptimalkan dengan anggaran per porsinya.

Temuan selanjutnya apabila anak-anak tidak suka maka dapur menerima laporan agar bisa menyesuaikan dengan kesukaan anak-anak. Dapur langsung mengevaluasi dengan menghapus menu

[81] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 32.
[82] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 30.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut. Selain itu, ada yang dibawa pulang tetapi kebanyakan dari anak kelas 1 yang makannya masih disupin. Pertimbangan makanan kesukaan anak-anak ini juga sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis yang menyebutkan "mempertimbangkan kesukaan dan ketidaksukaan anak terhadap makanan dan menu yang diberikan".[83] Hal ini menunjukkan bahwa SPPG tetap menjalankan sesuai dengan aturan dan tidak sembarangan dalam menentukan menu serta pertimbangan menu ini membuat anak-anak menjadi suka dan tetap terpenuhi gizinya.

Adanya dokumen administrasi tersebut menunjukkan bahwa dalam penyaluran Makan Bergizi Gratis tidak bisa sembarangan dan harus menyesuaikan dengan jumlah pnerima, pertanggungjawaban dalam menyalurarkan program serta keamanan pangan sebelum pendistribusian. Dokumen surat jalan dan berita acara serah terima ini juga sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintah untuk program makan bergizi gratis yang menyebutkan "tanda terima setiap kali penyaluran MBG kepada penerima bantuan"[84] hal ini dipergunakan oleh pihak SPPG untuk bentuk pertanggungjawaban laporan kepada Badan Gizi Nasioonal.

Terdapat gambaran perbedaan menu dalam porsi kecil dan porsi besar. Gambaran tersebut tercantur keterangan menu, perhitungan gizi

[83] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 18.
[84] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

serta anggaran yang seharusnya di dapatkan penerima manfaat, agar masyarakat dapat memahami penyaluran dalam segi menu. Hal ini juga tertuang dalam Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis yang mnyebutkan :komponen pengelompokkan penerimammanfaat dan indeks proposal pengajuan untuk operasional SPPG yaitu belaja bahan *at cost* meliputi: anak balita, Paud/TK/RA, SD/MI kelas 1-3 sebesar maksmal Rp. 8.000/orang, dan SD/MI kelas 4-6, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, SLB, Santri, ibu hamil, ibu menyusui sebesar Rp. 10.000/orang".[85] Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan gizi anak harus disesuaikan dengan usia serta kecukupan gizi per harinya.

Adanya tahapan pelaksanaan yang jelas serta bukti dokumen administrasi dalam Implementasi penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan bahwa kebijakan publik dilaksanakan secara terstruktur dan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan. Setiap proses dimulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan makanan, pengolahan, pemorsian, hingga distribusi dilakukan melalui alur kerja yang sistematis. Selain itu, adanya perubahan menu dan porsi antara porsi besar dan keecil menunjukkan bahwa pelaksanaan program memperhatikan kebutuhan serta kondisi penerima manfaat berdasarkan kelompok usia dan kebutuhan gizi. Temuan tersebut memperlihatkan implementasi kebijakan tidak dilakukan secara

[85] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 32.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seragam tanpa pertimbangan, melainkan menyesuaikan realitas sosial di lapangan.

Dengan demikian, kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan aturan yang berlaku menunjukkan bahwa program MBG dilaksanakan secara serius, terencana, dan tidak dilakukan secara asal-asalan. Adanya tahapan kerja, administrasi yang tertib, serta penyesuaian menu berdasarkan kebutuhan penerima manfaat menjadi bukti bahwa kebijakan publik dijalankan melalui mekanisme birokrasi yang matang dan tetap memperhatikan aspek sosial masyarakat sebagai tujuan utama kebijakan tersebut.

Namun, dalam implementasinya masih ada temuan seperti buah busuk dan lauk basi serta kekurangan nasi dan kekurangan bantuan tenaga pada tim pemorsian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terdapat kendala teknis di lapangan yang memengaruhi kualitas pelayanan kepada penerima manfaat. Meskipun secara umum tahapan pelaksanaan telah berjalan sesuai prosedur, beberapa kendala tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal dalam menjaga kualitas makanan, ketepatan jumlah porsi, dan kesiapan sumber daya manusia. Hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis yang menyebutkan “cara memilih bahan baku yang berkualitas pada ayam, pilih ayam masih segar, belum lama dipotong

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan tidak mengeluarkan bau busuk. Dan pada buah, kondisi buah harus segar, manis, bebas pestisida".[86] Hal ini dilakukan agar kualitas bahan bagus dan proses distribusi perlu diperkuat agar makanan yang diterima benar-benar layak konsumsi. Sementara itu, kekurangan nasi dan keterbatasan tenaga pada tim pemorsian menunjukkan adanya kendala dalam pengelolaan sumber daya dan perencanaan operasional program. Hal ini diatur dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Tentang Sisa Pangan, Sampah, Dan Air Limbah Domestik Program Makan Bergizi Gratis pasal 6 ayat (1) huruf b yang menyebutkan "bahan evaluasi produksi berlebih, penyimpanan yang tidak tepat, serta pengolahan yang kurang efisien dan perencanaan porsi dan menu berikutnya untuk mencegah pemborosan Pangan".[87] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan jumlah produksi pangan menjadi bagian penting dalam tata kelola Program MBG agar tidak terjadi kekurangan maupun pemborosan makanan. Dalam penelitian ini, kekurangan nasi memperlihatkan bahwa kebutuhan produksi dalam jumlah besar memerlukan ketepatan estimasi porsi dan kesiapan cadangan bahan pangan.

Apabila dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik George C. Edward III, temuan tersebut menunjukkan bahwa

[86] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 40.
[87] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Sisa Pangan, Sampah, Dan Air Limbah Domestik Program Makan Bergizi Gratis, pasal 6 ayat (1) huruf b.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

implementasi kebijakan telah memenuhi empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pada aspek komunikasi, pelaksanaan program menunjukkan adanya koordinasi yang baik antarpelaksana. Informasi mengenai jadwal distribusi, pembagian tugas, serta penyesuaian pendistribusian selama bulan Ramadan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh tim sehingga program tetap berjalan meskipun terdapat perubahan kondisi. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi dalam implementasi kebijakan berlangsung secara jelas dan konsisten.

Pada aspek struktur birokrasi, implementasi program telah memiliki mekanisme kerja yang tersusun secara sistematis. Adanya pembagian tahapan mulai dari tim persiapan hingga pendistribusian, jadwal pendistribusian yang dilakukan lima hari dalam satu minggu, serta penggunaan dokumen administrasi berupa surat jalan dan berita acara serah terima menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP). Kejelasan pembagian tugas dan prosedur tersebut memudahkan setiap pelaksana dalam menjalankan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung secara terorganisasi.

Pada aspek disposisi, pelaksana menunjukkan komitmen dalam menjalankan kebijakan dengan tetap melaksanakan pendistribusian sesuai jadwal yang telah ditentukan, termasuk melakukan penyesuaian selama bulan Ramadan. Sikap tersebut mencerminkan adanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesediaan pelaksana untuk tetap memberikan pelayanan kepada penerima manfaat meskipun terdapat perubahan kondisi operasional.

Namun demikian, pada aspek sumber daya masih ditemukan beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterlambatan pendistribusian akibat kekurangan nasi yang disebabkan oleh keterbatasan tenaga kerja pada bagian pemorsian. Selain itu, pada beberapa pendistribusian masih ditemukan buah yang busuk dan lauk yang basi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan pengendalian mutu makanan belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Dengan demikian, faktor sumber daya menjadi aspek yang masih memerlukan perbaikan agar implementasi Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif.

Selanjutnya, apabila dianalisis menggunakan teori birokrasi Max Weber, implementasi Program Makan Bergizi Gratis telah mencerminkan karakteristik birokrasi rasional. Weber menjelaskan bahwa organisasi birokrasi yang ideal ditandai dengan adanya pembagian kerja yang jelas, hierarki kewenangan, aturan tertulis, prosedur operasional yang baku, serta administrasi yang terdokumentasi.

Karakteristik tersebut terlihat dari adanya pembagian tugas pada setiap tim pelaksana mulai dari persiapan, pengolahan makanan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemorsian, pengemasan, hingga pendistribusian. Selain itu, pelaksanaan program juga dilengkapi dengan jadwal distribusi yang telah ditentukan, penggunaan surat jalan sebagai dokumen pengiriman, serta berita acara serah terima sebagai bukti administratif bahwa makanan telah diterima oleh pihak sekolah. Adanya administrasi tersebut menunjukkan bahwa setiap kegiatan pendistribusian dapat dipertanggungjawabkan secara administratif sehingga mencerminkan prinsip birokrasi yang rasional sebagaimana dikemukakan oleh Weber.

Meskipun demikian, Weber juga menekankan bahwa birokrasi yang baik harus mampu bekerja secara efisien. Dalam penelitian ini, masih ditemukannya keterlambatan distribusi akibat kekurangan nasi, keterbatasan tenaga kerja pada bagian pemorsian, serta ditemukannya buah yang busuk dan lauk yang basi menunjukkan bahwa efektivitas birokrasi belum sepenuhnya tercapai. Dengan kata lain, struktur birokrasi yang telah tersusun dengan baik belum sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas sumber daya manusia dan pengendalian operasional yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pelaksana serta penguatan sistem pengawasan mutu menjadi kebutuhan agar birokrasi dapat menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal.

Apabila dikaji menggunakan teori *Sociological Jurisprudence*, hukum dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Dalam konteks

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Program Makan Bergizi Gratis, kebijakan ini merupakan instrumen pemerintah untuk memenuhi hak peserta didik memperoleh makanan bergizi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Hal tersebut terlihat dari adanya penyesuaian jadwal pendistribusian selama bulan Ramadan sehingga implementasi kebijakan tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan huk um bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat sebagaimana konsep *living law* dalam teori *Sociological Jurisprudence*.

Namun demikian, teori ini juga menekankan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Masih ditemukannya buah yang busuk, lauk yang basi, serta keterlambatan pendistribusian menunjukkan bahwa tujuan kebijakan untuk memberikan pelayanan pangan bergizi secara optimal belum sepenuhnya tercapai. Meskipun secara normatif prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan, efektivitas implementasi masih memerlukan perbaikan terutama pada aspek penyediaan sumber daya, pengendalian mutu makanan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat. Dengan demikian, implementasi Program

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Makan Bergizi Gratis telah menunjukkan kesesuaian antara ketentuan hukum dengan kebutuhan masyarakat, namun masih memerlukan penyempurnaan agar tujuan hukum berupa kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Sarah Meirina Sari mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bondowoso yang menunjukkan bahwa implementasi program telah berjalan cukup efektif, namun masih memerlukan penguatan tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan sistem logistik agar program berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.[88]

Kesamaan tersebut terlihat pada pelaksanaan program yang telah mampu berjalan sesuai tujuan kebijakan dan didukung adanya koordinasi antar pelaksana. Akan tetapi, penelitian ini menemukan adanya penguatan tata kelola yang lebih terstruktur dibandingkan penelitian terdahulu. Penguatan tersebut terlihat dari adanya tahapan penyaluran yang jelas, penjadwalan distribusi makanan yang teratur, serta kelengkapan dokumen administrasi pada saat serah terima makanan kepada penerima manfaat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada keberhasilan distribusi makanan, tetapi juga pada tertib administrasi dan mekanisme tata kelola yang

[88] Sari, S. M.” Implementation of the free nutritious meal policy in bondowoso regency.” *Journal Publicuho*., (2025): https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.896

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sistematis. Adanya tahapan penyaluran dan dokumen serah terima mencerminkan pelaksanaan fungsi administrasi dan pengendalian yang lebih baik sehingga dapat meminimalisasi kesalahan distribusi serta meningkatkan akuntabilitas program.

b. Bentuk Pengawasan Terhadap Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Desa Wonoasri Kabupaten Jember

Pengawasan dalam implementasi Program MBG di SPPG Desa Wonoasri bersifat terintegritas, berlapis, dan *preventif*. Pengawasan tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa tersalurkannya makanan, tetapi juga mencakup proses produksi, kebersihan, kualitas pangan, kedisiplinan pekerja, hingga kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, keberhasilan pengawasan program MBG dipengaruhi oleh koordinasi antar pengawas internal, keterlibatan lembaga eksternal, penggunaan teknologi pengawasan, serta pembinaan disiplin dan kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan standar operasional program.

Dalam pengawasan internal yang dilakukan oleh Kepala Dapur, Ahli gizi, dan Akuntan sudah sesuai dengan tanggung jawab mereka dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis yang menyebutkan "mengawasi kinerja dan pengembangan tim, menetapkan jadwal kerja, dan mengelola konflik dan mengatur operasional harian dari mulai produksi hingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

distribusi".[89] Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis telah berjalan sesuai dengan petunjuk tekni yang di tetapkan pemerintah program MBG. Kepala Dapur, Ahli Gizi, dan Akuntan menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan pembagian tugas dan kewenangan maisng-masing.

Selain pengawas internal yang mencakup Kepala Dapur, Ahli Gizi, dan Akuntan. Terdapat Asisten Lapangan pada tahap pendistribusian, dimana Asisten Lapangan atau disebut ASLAP ini juga berkontribusi sebagai pengawas yang dipilih langsung oleh Kepala Dapur SPPG untuk membantu jalannya program pada saat pendistribusian. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis menyebutkan bahwa "pengawas pemeliharaan dan penghantara (Asisten Lapangan) bertanggung jawab sebagai pelaksana terdepan dalam menjalin hubungan dengan pihak eksternal khususnya dengan pihak sekolah dan memastikan proses produksi berjalan lancar tidak ada halangan serta selesai sesuai waktu yang sudah ditentukan".[90] Dalam hal ini jelas bahwa pada saat pendistribusian tidak bisa sembarangan dan tentu harus menjaga keharmonisan dengan penerima manfaat, maka dari itu ASLAP ada untuk mengawasi program berjalan sesuai aturan.

Terdapat juga CCTV negara setiap sudut dapur menunjukkan bahwa pengawasan tetap berjalan meskipun dapur jauh dari

[89] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 35.
[90] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 36.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengawasan Badan Gizi Nasional pusat. Dengan adanya CCTV ini tentu pengawasan BGN tetap berjalan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 pasal 56 yang menyebutkan "pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Badan Gizi Nasional dan/lembaga pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional".[91] Dalam hal ini CCTV sebagai sarana atau instrumen pendukung pengawasan inten untuk membantu Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan operasional dapur secara jarak jauh. Hal ini di pertegas juga dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis yang menyebutkan "internet sebagai sarana komunikasi SPPG dengan pusat, pemantauan CCTV *real time* dan transaksi bank".[92] Pengawasan tidak hanya dilakukan secara langsung melalui kunjungan lapangan, tetapi juga secara tidak langsung melalui teknologi pemantauan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lokasi dapur jauh dari pusat, kontrol terhadap proses produksi, kebersihan, distribusi dan kedisiplinan kerja tetap dapat dilakukan oleh pihak BGN maupun pengawas internal lainnya.

Bukan hanya pengawasan internal saja tetapi juga melibatkan pengawasan eksternal terhadap implementasi program makan bergizi

[91] Setneg RI, PERPRES No. 115 Tahun 2025, pasal 56.
[92] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 41.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

gratis. Dalam hal ini dilakukan oleh puskesmas setempat yang melakukan pengecekan terhadap kebersihan dapur, kadar air. Selain pengecekan terhadap kebersihan dapur dan kadar air, puskesmas juga menanggulangi kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan. Hal ini tertera dalam Standar Operasional Prosedur Kementerian Kesehatan yang menyebutkan "melakukan investigasi faktor risiko pangan dan lingkungan di tempat pengelolaan pangan".[93] Ketentuan ini memperlihatkan adanya keterlibatan institusi kesehatan dalam memastikan seluruh proses pengelolaan makanan berjalan sesuai standar higienitas dan sanitasi yang berlaku.

Selain itu, kunjungan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan menunjukkan bahwa pengawasan mempertimbangkan keamanan pangan yang akan di konsumsi anak-anak. Dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 pasal 24 ayat (5) menyebutkan "pengawasan bahan baku berupa pangan olahan dilakukan oleh kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan".[94] Pada pasal 28 ayat (1) dan (2) menyebutkan "dalam penyediaan makanan bergizi secara gratis, Badan Gizi Nasional menerapkan standar kehalalan produk bagi yang dipersyaratkan untuk kelompok sasaran dan standar kehalalan produk berupa pemenuhan kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan

[93] Kemenkes RI, Sosialisasi SOP Keamanan Pangan Siap Saji Pada Program MBG, (2025).

[94] Setneg RI, PERPRES No. 115 Tahun 2025, pasal 24 ayat (5).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ketentuan peraturan perundang-undangan".[95] Pengawasan terhadap bahan baku dan makanan olahan menjadi bagian penting agar makanan yang diberikan layak konsumsi, aman, dan tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa ada sanksi jika terjadi pelanggaran. Hal ini sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis yang menyebutkan "apabila melakukan pelanggaran yang tidak sesuai petunjuk teknis dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati, berupa teguran tertulis, pembatalan Perjanjian Kerja Sama, dan pemecatan".[96] Akan tetapi selama SPPG operasional belum ada yang melanggar. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh staf mengikuti instruksi dan mengikuti aturan tidak sembarangan dalam mengambil langkah, serta hal ini menunjukkan kehati-hatian dalam menjalankan seluruh tahapan.

Selain itu, kedisiplinan sumber daya menjadi bentuk pengawasan dari Badan Gizi Nasional, yang dimana dalam hal ini Badan Gizi Nasional telah melakukan pembinaan kepada sukarelawan agar program bekerja sesuai aturan dan tidak sembarangan. Hal ini juga dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis yang menyebutkan "tenaga kerja harus dilaksanakan training dan pembekalan tentang

[95] Setneg RI, PERPRES No. 115 Tahun 2025, pasal 28 ayat (1) dan (2).
[96] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 48.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tupoksi masing-masing, kebersihan, pengetahuan tata boga, dan pengetahuan lain-lain sebelum SPPG operasional".[97] Hal ini menunjukkan bahwa dalam implementasi penyaluran program MBG sudah disiapkan secara matang dan pemilihan tenaga kerja tidak sembarangan serta dilakukan pengawasan pembinaan oleh BGN langsung.

Selanjutnya adanya bukti dokumen uji organoleptik dalam hal ini adalah dimana guru diberikan percobaan makanna (*tester)* untuk menilai menu baru yang akan didistribusikan kepada anak-anak. Hal ini juga diterangkan dalam Standar Operasional Prosedur Kementerian Kesehatan yang menyebutkan "sebelum di konsumsi siswa, guru, atau penanggung jawab di sekolah melakukan uji organoleptik yaitu melihat, membau, dan mencicipi makanan sesaat sebelum dikonsumsi siswa".[98] Hal ini menunjukkan bahwa pihak SPPG tidak sembarangan dalam pemilihan menu dan tentu dalam hal ini digunakan pihak SPPG untuk menjamin keamanan pangan. Adanya evaluasi menu ini juga diperuat oleh Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia tentang Sisa Pangan, Sampah, Dan Air Limbah Domestik Program Makan Bergizi Gratis pada pasal 6 ayat (5) yang menyebutkan "Pendataan daya terima dari penerima Program MBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menggunakan

[97] BGN, Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program MBG, hlm. 41.
[98] Kemenkes RI, Sosialisasi SOP Keamanan Pangan Siap Saji Pada Program MBG, (2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kuesioner evaluasi menu".[99] Adanya evaluasi ini menunjukkan bahwa SPPG tidak hanya melaksanakan distribusi pangan tetapi juga melakukan pengendalian mutu dan daya terima makanan oleh penerima manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada SPPG Pelosok Desa telah dilaksanakan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala SPPG sebagai penanggung jawab operasional, ahli gizi yang mengawasi kesesuaian mutu dan kandungan gizi makanan, serta akuntan yang mengawasi aspek administrasi dan keuangan. Selain pengawasan yang dilakukan oleh sumber daya manusia, SPPG juga memanfaatkan kamera pengawas (CCTV) sebagai sarana pengawasan terhadap aktivitas operasional di lingkungan dapur. Pada tahap pendistribusian, pengawasan dilakukan oleh asisten lapangan yang bertugas memastikan makanan sampai kepada penerima manfaat sesuai dengan jumlah, waktu, dan kondisi yang telah ditetapkan.

Di samping pengawasan internal, penelitian juga menemukan adanya pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Puskesmas dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Puskesmas melakukan pengawasan terhadap aspek kesehatan dan sanitasi lingkungan, sedangkan BPOM melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap

[99] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Sisa Pangan, Sampah, Dan Air Limbah Domestik Program Makan Bergizi Gratis, pasal 6 ayat (5).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keamanan pangan untuk memastikan makanan yang diproduksi memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku. Selain itu, sebelum SPPG mulai beroperasi, seluruh tenaga pelaksana diwajibkan mengikuti pelatihan (*training*) selama kurang lebih tiga bulan sebagai bentuk pembekalan mengenai standar operasional, keamanan pangan, higiene dan sanitasi, tata kelola pelayanan, serta pembagian tugas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Apabila dianalisis menggunakan teori pengawasan George R. Terry, pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan melalui tahapan penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, perbandingan hasil dengan standar, serta tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan.

Tahap pertama, yaitu penetapan standar (establishing standards), tercermin dari adanya pelatihan selama tiga bulan sebelum SPPG mulai beroperasi. Pelatihan tersebut menjadi dasar bagi seluruh pelaksana untuk memahami standar operasional pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, mulai dari proses pengolahan makanan, kebersihan, keamanan pangan, administrasi, hingga mekanisme pendistribusian. Dengan adanya standar yang dipahami bersama, setiap pelaksana memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan tugasnya.

Tahap kedua, yaitu pengukuran pelaksanaan pekerjaan (measuring performance), terlihat dari pelaksanaan pengawasan secara langsung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

oleh Kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, dan asisten lapangan. Kepala SPPG melakukan pemantauan terhadap keseluruhan proses operasional, ahli gizi mengawasi kualitas dan kesesuaian menu, akuntan memastikan tertib administrasi dan penggunaan anggaran, sedangkan asisten lapangan memantau proses distribusi hingga makanan diterima oleh sekolah penerima manfaat. Selain pengawasan langsung, penggunaan CCTV juga menunjukkan adanya pengawasan berkelanjutan terhadap aktivitas operasional sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat dipantau setiap saat.

Tahap ketiga, yaitu membandingkan pelaksanaan dengan standar (comparing performance with standards), tercermin melalui keterlibatan Puskesmas dan BPOM sebagai pengawas eksternal. Pengawasan oleh kedua instansi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi makanan, sanitasi, keamanan pangan, dan kualitas makanan telah sesuai dengan standar kesehatan serta ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan dari pihak eksternal, pelaksanaan program tidak hanya dinilai oleh penyelenggara, tetapi juga memperoleh penilaian yang lebih objektif dari lembaga yang memiliki kewenangan di bidang kesehatan dan keamanan pangan.

Tahap terakhir, yaitu tindakan perbaikan (corrective action), diwujudkan melalui pembinaan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kehadiran pengawas internal maupun eksternal memungkinkan penyelenggara segera melakukan perbaikan terhadap berbagai kekurangan sehingga kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian, sistem pengawasan pada Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfungsi menemukan kesalahan, tetapi juga menjadi mekanisme untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program secara berkelanjutan sebagaimana konsep pengawasan menurut George R. Terry.

Selanjutnya, apabila dikaji menggunakan teori birokrasi Max Weber, bentuk pengawasan yang diterapkan pada Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan karakteristik birokrasi yang rasional. Weber menjelaskan bahwa organisasi birokrasi yang ideal memiliki pembagian kewenangan yang jelas, hierarki jabatan, aturan tertulis, spesialisasi pekerjaan, serta sistem pengawasan yang dijalankan oleh pejabat sesuai dengan kompetensinya.

Hal tersebut terlihat dari pembagian fungsi pengawasan berdasarkan bidang keahlian masing-masing. Kepala SPPG bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasional, ahli gizi memiliki kewenangan dalam pengawasan mutu gizi makanan, akuntan bertanggung jawab terhadap administrasi dan keuangan, sedangkan asisten lapangan mengawasi proses pendistribusian. Pembagian tugas tersebut menunjukkan adanya spesialisasi jabatan sebagaimana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dikemukakan oleh Weber sehingga setiap pengawas memiliki ruang lingkup kewenangan yang jelas dan tidak saling tumpang tindih.

Selain itu, keberadaan CCTV menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga didukung oleh sistem administrasi dan teknologi sebagai instrumen birokrasi modern. Pengawasan eksternal oleh Puskesmas dan BPOM juga mencerminkan adanya hubungan antarlembaga dalam struktur pemerintahan yang saling mengawasi sesuai kewenangan masing-masing. Dengan demikian, mekanisme pengawasan pada Program Makan Bergizi Gratis telah menunjukkan penerapan prinsip birokrasi rasional yang mengutamakan profesionalisme, akuntabilitas, serta kepastian prosedur.

Meskipun demikian, teori Weber juga menekankan bahwa birokrasi tidak hanya dinilai dari lengkapnya struktur organisasi, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan fungsi organisasi. Oleh karena itu, keberadaan berbagai bentuk pengawasan tersebut harus mampu menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Pengawasan akan kehilangan maknanya apabila hanya menjadi formalitas administratif tanpa mampu mencegah maupun memperbaiki penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Selanjutnya, apabila dianalisis menggunakan teori *Sociological Jurisprudence*, hukum dipandang sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban sosial dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (*law*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

as a tool of social engineering). Dalam perspektif ini, pengawasan bukan sekadar pelaksanaan kewajiban administratif,

tetapi merupakan instrumen untuk memastikan bahwa tujuan hukum benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan publik yang bertujuan memenuhi hak masyarakat, khususnya peserta didik, untuk memperoleh makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh Kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, asisten lapangan, Puskesmas, dan BPOM merupakan bentuk implementasi hukum agar tujuan kebijakan tersebut dapat diwujudkan secara nyata. Kehadiran pengawasan internal memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan berjalan sesuai standar operasional, sedangkan pengawasan eksternal memberikan jaminan objektivitas serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Pelaksanaan pelatihan selama tiga bulan sebelum operasional SPPG juga mencerminkan bahwa implementasi hukum tidak hanya dilakukan melalui pengawasan setelah kegiatan berlangsung, tetapi juga melalui upaya preventif untuk membangun kompetensi pelaksana. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum berfungsi membentuk perilaku aparatur agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan demikian, berdasarkan perspektif *Sociological Jurisprudence*, sistem pengawasan dalam Program Makan Bergizi Gratis telah menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjamin terwujudnya kemanfaatan sosial. Semakin efektif pengawasan dilakukan, semakin besar pula peluang tercapainya tujuan kebijakan, yaitu tersedianya makanan bergizi yang aman, layak konsumsi, dan memberikan manfaat bagi peserta didik sebagai penerima manfaat program.

Berbeda dengan penelitian Trimerta Kirana Modok dkk. mengenai tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Kota Kupang yang menemukan bahwa perencanaan menu masih bersifat sentralistis dan kurang partisipatif karena sekolah maupun penerima manfaat tidak dilibatkan secara aktif dalam penyusunan menu, penelitian ini menunjukkan adanya bentuk partisipasi penerima manfaat dalam proses evaluasi menu.[100] Pada penelitian ini ditemukan bahwa ketika terdapat menu baru, pihak SPPG terlebih dahulu melakukan uji organoleptik kepada penerima manfaat untuk mengetahui tingkat penerimaan terhadap rasa, aroma, tekstur, dan tampilan makanan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerima manfaat tidak hanya menjadi objek program, tetapi juga turut berpartisipasi dalam penyesuaian kualitas menu yang akan diberikan. Dengan demikian,

[100] Trimerta Kirana Modok et al., "Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Kota Kupang". Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan., (2026):678-679.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

implementasi program pada penelitian ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih partisipatif dibandingkan penelitian terdahulu.

Selain itu, penelitian terdahulu menemukan bahwa mekanisme pengadaan bahan pangan belum sepenuhnya memenuhi standar pengendalian mutu dan transparansi karena pemilihan pemasok belum didasarkan pada standar tertulis yang jelas. Sementara itu, dalam penelitian ini meskipun ditemukan adanya pemasok yang terkadang memberikan bahan pangan kurang layak, pengawasan terhadap keamanan pangan tetap dilakukan secara ketat melalui pemeriksaan internal serta keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Keterlibatan BPOM menunjukkan bahwa keamanan dan kelayakan bahan pangan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan Program MBG sehingga kualitas makanan tetap diawasi sebelum dikonsumsi penerima manfaat.

Perbedaan lainnya terletak pada sistem pengawasan program. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengawasan dan tindak lanjut aduan masih bersifat administratif dan belum terdokumentasi secara optimal. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pengawasan dilakukan secara lebih ketat dan berlapis dengan melibatkan berbagai pihak, seperti kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, asisten lapangan, hingga pengawasan eksternal melalui BPOM dan pemantauan CCTV yang terhubung dengan Badan Gizi Nasional pusat. Pengawasan berlapis tersebut dilakukan mulai dari tahap persiapan bahan pangan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengolahan, pemorsian, hingga pendistribusian makanan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan dalam penelitian ini lebih terstruktur guna menjaga kualitas pelayanan dan kelancaran pelaksanaan program.

Dengan demikian, meskipun penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama membahas Program Makan Bergizi Gratis, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pada tingkat partisipasi penerima manfaat, pengawasan keamanan pangan, dan sistem pengawasan program. Penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi Program MBG tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga mulai mengarah pada penguatan partisipasi dan pengendalian mutu secara langsung di lapangan.

Pada penelitian ini menemukan bahwa pengawasan Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara berlapis melalui pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, serta asisten lapangan yang mengawasi proses persiapan bahan pangan, pemorsian, hingga pendistribusian makanan. Selain itu, pengawasan eksternal juga dilakukan oleh puskesmas dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan keamanan dan kelayakan pangan yang akan dikonsumsi penerima manfaat. Pengawasan turut diperkuat melalui CCTV yang terhubung langsung dengan Badan Gizi Nasional sebagai bentuk monitoring berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Temuan ini berbeda dengan penelitian Angga Rosidin, Jaka Maulana, dan Awan Dharmawan yang menemukan bahwa pengawasan kualitas makanan di Provinsi Banten belum berjalan optimal karena Dinas Kesehatan belum rutin melakukan verifikasi lapangan dan pengawasan masih lemah dalam koordinasi antar sektor. Penelitian terdahulu lebih menyoroti hambatan pengawasan, sedangkan penelitian ini menunjukkan adanya sistem pengawasan yang lebih komprehensif, terstruktur, dan melibatkan berbagai lembaga pengawas.[101]

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya uji organoleptik terhadap menu baru sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan setelah makanan diproduksi, tetapi juga dilakukan secara preventif untuk memastikan kualitas rasa, aroma, tekstur, dan kelayakan konsumsi makanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[101] Angga Rosidin, Jaka Maulana, Awan Dharmawan. " Tantangan dan Strategi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Banten". Jurnal Hukum dan Administrasi Publik ., (2025):131–143.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

a. Implementasi penyaluran Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Desa Wonoasri pada dasarnya telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, SOP Kementerian Kesehatan, dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Desa Wonoasri telah dilaksanakan secara terstruktur mulai dari tahap persiapan bahan, pengolahan, pemorsian, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat. Pelaksanaan program didukung dengan pembagian tugas yang jelas, jadwal distribusi yang teratur, serta administrasi resmi berupa surat jalan, berita acara serah terima (BAST). Pihak SPPG Desa Wonoasri melakukan evaluasi dan penanganan cepat terhadap setiap kendala melalui penyediaan makanan cadangan, penggantian makanan yang tidak layak konsumsi, serta penyesuaian menu berdasarkan kebutuhan penerima manfaat. Selain itu, implementasi program juga bersifat adaptif terhadap kondisi masyarakat, seperti perubahan menu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

selama Ramadan, penyesuaian jadwal distribusi, serta perbedaan porsi makanan berdasarkan usia penerima manfaat. sosial penerima manfaat.

b. Bentuk pengawasan terhadap penyaluran Program MBG di Desa Wonoasri. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Desa Wonoasri dilaksanakan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Dapur, Ahli Gizi, Akuntan, dan Asisten Lapangan yang bertugas mengawasi proses produksi, kualitas makanan, distribusi, kebersihan dapur, serta pencatatan bahan dan keuangan. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Puskesmas, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta CCTV yang terhubung langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pusat. Pengawasan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sesuai standar keamanan pangan dan kesehatan dalam Program MBG. Adanya checklist uji organoleptik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program telah berjalan sesuai standar pelayanan dan keamanan pangan dalam Program MBG.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

a. Berdasarkan kendala yang ditemukan dalam implementasi penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti buah busuk, lauk basi, kekurangan nasi, dan kekurangan tenaga kerja, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap kualitas makanan, perbaikan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

manajemen distribusi dan perhitungan porsi, serta penambahan dan penguatan kapasitas tenaga kerja agar proses penyaluran dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, koordinasi dan evaluasi rutin antar pihak pelaksana juga perlu ditingkatkan guna meminimalisir terjadinya buah busuk, lauk basi, maupun kekurangan makanan pada penerima manfaat.

b. Berdasarkan hasil penelitian, sistem pengawasan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan dengan baik melalui pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan secara berlapis. Oleh karena itu, pengawasan yang sudah berjalan efektif tersebut perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan melalui evaluasi rutin, koordinasi antar pihak pengawas, serta konsistensi pengecekan oleh pihak eksternal agar kualitas dan keamanan pelaksanaan program tetap terjaga secara berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agus Wibowo., Teori Sosiologi Hukum. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bersama Universitas Sains Dan Teknologi Komputer. (2024).

Fauzan., Birokrasi Dan Publik Governance. Yogyakarta: Cv. Istana Agency Anggota Ikapi No.138/ Diy/ 2021. (2024).

Hadi Prabowo., Birokrasi Dan Pelayanan Publik. Padalarang - Bandung Barat: Bimedia Pustaka Utama. (2022).

Hermanu Iriawan., Birokrasi Indonesia. Malang: Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup. (2024).

Ibrahim Kristofol Kendi., Implementasi Kebijakan Publik, Aktor, Perangkat, Manajemen, Dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari (Anggota Ikapi) Bandung—Indonesia. (2023).

Jonaedi Efendi, & Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Jakarta: Kencana Divisi Dari Prenadamedia Group. (2016).

Joko Pramono, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: Unisri Press,(2020).

Thoha, Miftah, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Jakarta: Kencana Prenada Media (2012).

Muhammad Sawir., Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan Cv Budi Utama) Anggota Ikapi., (2020).

Nur Solikin., Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan-Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media., (2021).

Rahmawati Sururama., "Pengawasan Pemerintahan". Bandung: Penerbit Cendekia Press-Bandung., (2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jurnal :

Angga Rosidin, Jaka Maulana, Awan Dharmawan, Tantangan Dan Strategi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Banten . Jurnal Hukum Dan Administrasi Publik, (2025):131–143.

Andri Kusuma Jati, Azhar, Atrika Iriani. " Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Makan Bergizi Gratis Di Indonesia". Ranah Research, (2025).

Amalia Pratiwi, Stephani Widia Rianti Sipangkar, Adinda Nazla Rizky Ramadhani, Santi Mulyady, Muhammad Rayyan Hylmi, Restu Rahmawati. "Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Dalam Kerangka Teori Mandat Hanna F. Pitkin". Jurnal Ilmu Sosial. (2025).

Agustini, U. "Efektivitas Dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Intervensi Pendidikan Di Indonesia", Jurnal Kiprah Pendidikan, (2025), Https://Doi.Org/10.33578/Kpd.V4i3.P362-368

Azzahra, N., Dharmawan, A., Mardatilah, A., Habibi, M., Aryani, V., & , S, "Pelaksanaan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis Di SMP Negeri 4 Tangerang", Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan., (2025)., Https://Doi.Org/10.31004/Jerkin.V3i4.1335

Dewi, A. D. M., & Sahal, Y. F. D., "*The Perspective Of Islamic Education Management Is Seen From The Management Of George R.Terry"*. An-Nuha, 3(1)., (2025).

Nainggolan, I. D. P., & Claretta, D, "Analisis Framing Portal Berita Kompas.Com Dan Mediaindonesia.Com Atas Pemberitaan Program Makan Siang Gratis Oleh Paslon 02 (Prabowo-Gibran) Pada Periode 28 November 2023 - 10 Februari 2024", Religion,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Education, And Social Laa Roiba Journal (RESLAJ)., (2024). Https://Doi.Org/10.47467/Reslaj.V6i10.3038

Oktarina, A., & Setiawan, B. "Tantangan Manajerial Calon Kepala SPPG Dalam Mengelola SPPG Di Sumatera Bagian Selatan: Studi Tentang Strategi Dan Kinerja", Jurnal Pariwisata Dan Perhotelan, 3(1)., (2025).. Https://Doi.Org/10.47134/Pjpp.V3i1.4867

Prangthip, P., Soe, Y. M., & Signar, J. F, "*Literature Review: Nutritional Factors Influencing Academic Achievement In School Age Childre*n", International Journal Of Adolescent Medicine And Health., (2021), Https://Doi.Org/10.1515/IJAMH-2018-0142

Rahmawati, N. A., Prasetyo, S. A., & Ramadhani, M. W, "Memetakan Visi Prabowo Gibran Pada Masa Kampanye Dalam Prespektif Pembangunan", Deleted Journal., (2024). Https://Doi.Org/10.62383/Wissen.V2i3.176

Susilowati, E., Rachma, H., Khotimah, K., Bunayyah, S., & Zumara, N. I, "Analisis Kebutuhan Dan Pemenuhan Nutrisi Pada Anak Usia Dini Di Indonesia: Tantangan, Dampak, Dan Strategi Intervensi Dalam Pendidikan", Jurnal Madinasika., (2025). Https://Doi.Org/10.31949/Madinasika.V6i2.14084

S, M. I., Desreza, N., & Resta, S. H, "Edukasi Pentingnya Makanan Bergizi Dan Memilih Jajanan Sehat Bagi Anak Usia Sekolah", Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat., (2023), Https://Doi.Org/10.47861/Jipm-Nalanda.V1i3.448

Sari, S. M. "*Implementation Of The Free Nutritious Meal Policy In Bondowoso Regency*". Journal Publicuho.,(2025). Https://Doi.Org/10.35817/Publicuho.V8i3.896

Trimerta Kirana Modok, Laurensius P. Sayrani, Delila A.N. Seran, I Putu Yoga B. Pradana., "Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kota Kupang". Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan., (2026):678-679.

Utomo, N. A., "Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia". 13(4)., (2016).

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Dan Pasal 28C.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Sisa Pangan, Sampah, Dan Air Limbah Domestik Program Makan Bergizi Gratis.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Badan Gizi Nasional, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gatis, (2025).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Sosialisasi SOP Keamanan Pangan Siap Saji Pada Program Makan Bergizi Gratis, (2025).

Skripsi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Syamsul Bahri ZR. "Retrieved From Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Syar'iyyah)". (2025).

Uun Mua'bidah., "Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan *Online Single Submission* Pada Perizinan Usaha." Skripsi, UIN KHAS Jember, (2023).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara:

Farhan Saputra, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember, 26 Januari 2025.

Nur Habibah, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember, 04 Mei 2026.

Sulastri, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.

Winarsih, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember, 10 November 2025.

Tinah, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember, 2 Juli 2026.

Tutik, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember, 2 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 1

MATRIK PENELITIAN

1. Pedoman Wawancara

NO.	Fokus	Indikator
1.	Implementasi program makan bergizi gratis di pedesaan Kabupaten Jember	Bagaimana alur penyaluran program MBG mulai dari pengolahan hingga makanan di terima?
		Apakah terdapat jadwal resmi pendistribusian makanan MBG dan siapa yang menetapkan lalu bagaimana pelaksanaannya di lapangan?
		Pernahkah terjadi keterlambatan pendistribusian makanan di sekolah, apabila iya, apakah penyebab utamanya?
		Bagaimana standar kualitas bahan pangan yang digunakan, khusunya buah dan lauk pauk sebelum di distribusikan?
		Bagaimana tindak lanjut SPPG ketika menerima komplain dari sekolah terkait keterlambatan atau kualitas makanan?
		Sebelum makanan di kirim apakah ada pemastian ulang atau pengecekan ulan terhadap makanan?
		Misal dalam MBG ada lauk basi atau buah busuk bagaimana tanggapan SPPG terkait hal tersebut?
		Bagaimana sistem penyaluran dengan hari libur atau waktu ramadhan?
		Lalu tanggapan SPPG dan para guru jika anak-anak tidak menyukai menu MBG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		pada hari itu? Apakah di bawa pulang?
2.	Bentuk pengawasan terhadap penyaluran program makan bergizi gratis di pedesaan Kabupaten Jember	Bagaimana struktur pengawasan internal terhadap penyaluran MBG di SPPG?
		Siapa saja pihak yang memilki kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan kualitas makanan?
		Apakah ada pihak yang melakukan pengawasan pada tahap pendistribusian di sekolah-sekolah?
		Apabila ada permasalahan waktu pendistribusian di sekolah-sekolah, apakah ada laporan tertulis atau dokumentasi?
		Apabila terjadi masalah internal misal kesalahan atau pelanggaran yang di lakukan staf, apakah ada sanksi untuk hal ini?
		Apakah ada pengawasan untuk memeriksa kembali makanan yang akan di distribusikan?
		Apakah intruksi kerja selalu di berikan secara tertulis atau lisan saja?
		Menurut anda, apakah pengawasan dari pimpinan sudah berjalan efektif?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Pedoman Dokumentasi

   a. Surat jalan dan berita acara serah terima MBG di sekolah dari SPPG pada setiap pendistribusian

   b. Dokumen ceklis setiap adanya menu baru ke sekolah dari SPPG

   c. Pamflet perbedaan menu porsi kecil dan porsi besar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 2

DOKUMENTASI BERSAMA NARASUMBER



Wawancara Bersama Staf Persiapan SPPG Desa Wonoasri



Wawancara Bersama Staf Pemorsian SPPG Desa Wonoasri



Wawancara Bersama Penerima Manfaat MTs Nurussalam



Wawancara Bersama Wali Murid Penerima Manfaat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara Bersama Wali Murid Penerima Manfaat



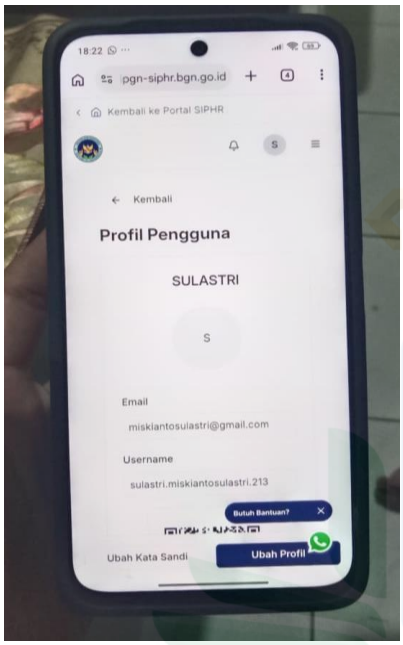
Wawancara Bersama Penerima Manfaat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

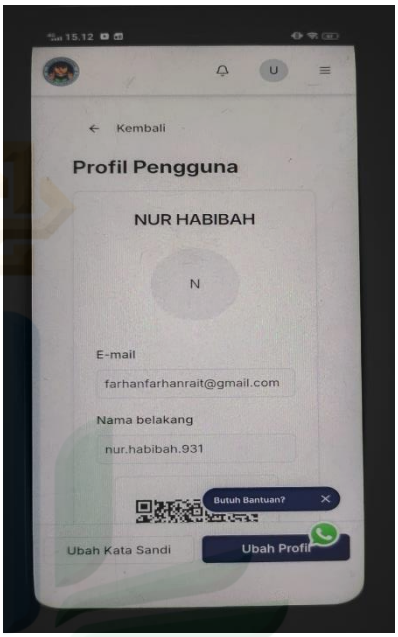
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 3

BUKTI AKUN RESMI NARASUMBER STAF SPPG DESA WONOASRI



Akun Dari Staf Persiapan
SPPG Desa Wonasri



Akun Dari Staf Pemorsian
SPPG Desa Wonoasri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Desika Intan Firliani
NIM	: 221102030032
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Instansi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 23 Juni 2026

yang menyatakan



Desika Intan Firliani
NIM. 221102030032

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	`: Desika Intan Firliani
NIM	`: 221102030032
Tempat/Tanggal Lahir	`: Jember, 12 Desember 2004
Alamat	: Jln. Majapahit, Dusun Kraton RT/008 RW/004, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember
Fakultas	`: Syariah
Jurusan/Prodi	`: Hukum Tata Negara
Nomor HP	`: 081998269581
Email	`: desikafirliani@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

MI Muhammadiyah 03 Kraton Tempurejo Jember

Mts Al-Amien Sabrang Ambulu Jember

MA Al-Amien Sabrang Ambulu Jember

C. Pengalaman Organisasi

Pengurus Harian IPPNU Ranting Kraton	(2021-2023)
Sekretaris PAC IPPNU Kecamatan Tempurejo	(2023-2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id